



PT PP ENERGI

Plaza PP 7th Floor

Jln. Letjend. TB. Simatupang No. 57

Pasar Rebo - Jakarta 13760 - Indonesia

Phone : (021) 840 3988

Website : www.pp-energi.co.id

Email : corsec@pp-energi.co.id

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK/ *AND ITS SUBSIDIARIES*

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION***

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
*FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

Tanggal 28 Februari 2023/ *Dated February 28, 2023*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021		<i>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2022 and 2021</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>
 INFORMASI TAMBAHAN		 SUPPLEMENTARY INFORMATION
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk Saja	Lampiran 1/ <i>Appendix 1</i>	<i>Schedule I : Statements of Financial Position - Parent Entity Only</i>
Daftar II : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk Saja	Lampiran 3/ <i>Appendix 3</i>	<i>Schedule II : Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity Only</i>
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk Saja	Lampiran 4/ <i>Appendix 4</i>	<i>Schedule III : Statements of Changes in Equity - Parent Entity Only</i>
Daftar VI : Laporan Arus Kas - Entitas Induk Saja	Lampiran 5/ <i>Appendix 5</i>	<i>Schedule IV : Statements of Cash Flows - Parent Entity Only</i>
Daftar V : Estimasi Cadangan (Tidak Diaudit)	Lampiran 6/ <i>Appendix 6</i>	<i>Schedule V : Reserves Estimation (Unaudited)</i>



PT PP ENERGI
Plaza PP 7th Floor
Jln. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760 - Indonesia
Phone : (021) 840 3988
Website : www.pp-energi.co.id
Email : corsec@pp-energi.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI
DAN ENTITAS ANAK**

**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN ENERGI
AND ITS SUBSIDIARIES**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Directors, We, the undersigned:

I. Nama	:	H.R. Ario Setyawan	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta Timur	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Sutorejo Selatan 6/19 RT 04 RW 08 Mulyorejo Surabaya	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 8403988	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
II. Nama	:	Supriyadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta Timur	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Permata I/6 Cluster Permata Prima RT 015 RW 008, Semarang	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 8403988	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Keuangan	:	Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
 2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Consolidated Financial Statements;*
 2. *The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information contained in the Company's Consolidated Financial Statements are complete and correct;*
b. *The Company's Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts; and*
 4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/ February 28, 2023

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

H. R. Ario Setyawan

Supriyadi

ENERGI

Energizing life

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Pembangunan Perumahan Energi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Energi dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian yang menyatakan bahwa Grup mengalami rugi bersih sebesar Rp.174.055.544.528 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.536.789.614.092. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

Independent Auditor's Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pembangunan Perumahan Energi

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pembangunan Perumahan Energi and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 37 to the consolidated financial statements which states that the Group suffered a net loss of Rp.174,055,544,528 for the year ended December 31, 2022 with accumulated deficit amounting to Rp.536,789,614,092. These conditions indicate the existence of material uncertainty which may cause significant doubt on the Group's ability to maintain its business continuity. Management plans to address such conditions have also been disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

No. 00016/2.1000/AU.1/02/0912-2/1/II/2023

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Bambang Karunawan, CPA.

Register Akuntan Publik/ Register of Public Accountant No. AP.0912

28 Februari 2023/ February 28, 2023

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
A S E T				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	18.637.198.889	26.295.352.736	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	6	10.155.328.673	10.380.420.002	Trade receivables
Aset keuangan atas proyek konsesi - bagian lancar	7	19.356.232.000	-	Financial assets for concession project - current portion
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.32.336.918.939 dan Rp.13.704.915.615 pada 31 Desember 2022 dan 2021	8	130.737.080.764	72.365.209.627	Other receivables - net of allowance for credit losses of Rp.32,336,918,939 and Rp.13,704,915,615 as at December 31, 2022 and 2021, respectively
Persediaan	9	-	368.258.300	Inventories
Beban dibayar dimuka	10	11.451.238.116	8.070.912.941	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	11a	70.026.466.130	79.297.320.631	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		260.363.544.572	196.777.474.237	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset keuangan atas proyek konsesi	7	142.557.768.000	194.713.000.000	Financial assets for concession project
Piutang lain-lain - pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.100.903.824.634 dan Rp.94.346.171.177 pada 31 Desember 2022 dan 2021	12	163.759.183.839	242.947.317.297	Other receivables - related parties - net of allowance for credit losses of Rp.100,903,824,634 and Rp.94,346,171,177 as at December 31, 2022 and 2021, respectively
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	13	97.132.871.326	90.512.563.968	Investments in associates and joint ventures
Investasi jangka panjang	14	246.428.935.000	246.428.935.000	Long-term investments
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	15	16.033.505	97.593.618	Property and equipment - net of accumulated depreciation
Aset minyak dan gas bumi	16	1.018.743.287.737	943.564.766.700	Oil and gas properties
Aset tidak lancar lainnya	17	596.254.029	555.543.204	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.669.234.333.436	1.718.819.719.787	Total Non - Current Assets
JUMLAH ASET		1.929.597.878.008	1.915.597.194.024	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	18	39.888.019.471	40.468.731.443	Trade payables
Utang pajak	11b	25.288.758.404	20.426.491.593	Taxes payables
Biaya yang masih harus dibayar	19	81.799.780.704	54.711.009.755	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities
Utang bank	20	570.960.967	2.582.451.709	current maturities
				Bank loans
Jumlah Liabilitas Lancar		147.547.519.546	118.188.684.500	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	18	57.752.429.587	55.508.306.158	Trade account payables
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	20	92.040.908.994	90.230.788.774	Bank loans
Liabilitas imbalan pasca kerja	21	6.448.795.802	5.384.182.200	Post-employment benefits liabilities
Utang lain-lain jangka panjang	22			Long-term other payables
Pihak berelasi		1.374.549.769.626	1.245.574.240.455	Related parties
Pihak ketiga		118.152.897.594	119.152.897.594	Third parties
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	23	7.656.915.379	-	Asset abandonment obligation and site restoration
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		1.656.601.716.982	1.515.850.415.181	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.804.149.236.528	1.634.039.099.681	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - par value
Rp.1.000.000 per saham				Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 700.000 saham				Authorized capital - 700,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - masing-masing sebesar 541.233 saham pada 31 Desember 2022 dan 2021	24	541.233.000.000	541.233.000.000	Subscribed and paid-up capital - amounted of 541,233 shares as at December 31, 2022 and 2021, respectively
Tambahan modal disetor - bersih	25	13.425.138.372	13.425.138.372	Additional paid in capital - net
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		1.120.988.700	1.268.642.323	Other comprehensive (loss) income
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		7.104.553.419	(3.445.776.633)	Exchange differences due to financial statement translation
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	26	117.261.246.915	46.500.234.923	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		(654.050.861.007)	(409.234.304.487)	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		26.094.066.399	189.746.934.498	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non pengendali	27	99.354.575.081	91.811.159.845	Non controlling interest
Jumlah Ekuitas		125.448.641.480	281.558.094.343	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.929.597.878.008	1.915.597.194.024	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN USAHA	28	147.605.695.014	138.699.027.599	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	29	(134.004.153.530)	(131.313.172.998)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
RUGI KOTOR		13.601.541.484	7.385.854.601	GROSS LOSS
BEBAN USAHA	30			OPERATING EXPENSES
Pegawai		(15.160.379.663)	(13.920.292.976)	Employees
Umum		(10.142.019.888)	(6.442.637.526)	General
Penyusutan dan amortisasi		(81.560.113)	(230.226.224)	Depreciation and amortization
Pemasaran		(655.232.275)	(440.177.217)	Marketing
Jumlah		(26.039.191.939)	(21.033.333.943)	Total
RUGI USAHA		(12.437.650.455)	(13.647.479.342)	OPERATING LOSS
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	31			Other Incomes (Expenses) - Net
Selisih kurs - bersih		55.106.327.355	10.790.689.298	Foreign exchange - net
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi		4.311.089.718	(3.740.044.512)	Gain or (loss) from associates
Pendapatan bunga		1.540.388.828	3.384.292.436	Interest income
Pemulihan cadangan penurunan nilai		7.049.582	409.356	Recovery allowance for impairment
Beban bunga		(126.106.548.957)	(122.491.801.333)	Interest expenses
Penurunan nilai aset atas proyek konsesi		(32.799.000.000)	(24.541.000.000)	Provision for impairment losses for concession project
Beban cadangan kerugian penurunan nilai		(25.138.437.957)	(31.654.062.305)	Allowance for impairment loss expense
Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi		(16.943.847.804)	(16.943.847.804)	Provision for impairment losses on oil and gas properties
Beban administrasi bank		(16.746.579)	(23.184.532)	Bank administration expense
Lain-lain - bersih		(18.520.840.179)	83.321.103.643	Others - net
Jumlah		(158.560.565.993)	(101.897.445.753)	Total
RUGI SEBELUM PAJAK		(170.998.216.448)	(115.544.925.095)	LOSS BEFORE TAX
(Beban) manfaat pajak penghasilan				Income tax (expense) benefit
Kini	11c	-	-	Current
Tangguhan	11c	-	-	Deffered
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		-	-	Income Tax Expense - Net
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(170.998.216.448)	(115.544.925.095)	NET LOSS FOR THE YEAR
Laba Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Laba aktuarial program imbalan kerja	21	(183.136.489)	233.302.114	Profit on employment benefit plan actuarial
Aset pajak tangguhan	11d	-	-	Deffered tax assets
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		15.071.900.074	(547.558.690)	Foreign exchange due to financial statement translation
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(156.109.452.863)	(115.859.181.671)	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				Net income attributable to:
Pemilik entitas induk		(174.055.544.528)	(133.522.940.041)	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		3.057.328.080	17.978.014.946	Non controlling interest
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(170.998.216.448)	(115.544.925.095)	NET LOSS FOR THE YEAR
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		(163.652.868.099)	(133.775.740.096)	Owners of parent entity
Kepentingan non pengendali		7.543.415.236	17.916.558.425	Non controlling interest
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(156.109.452.863)	(115.859.181.671)	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributed to the owner of the parent entity*

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Subscribed and paid up capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid in capital</i>	Uang muka setoran modal/ <i>Advance for stock subscription</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>		Saldo laba/ <i>Retained earning</i>		Kepentingan non- pengendali/ <i>Non-controlling interest</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>		
				Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ <i>Foreign exchange due to financial statement</i>	Keuntungan (kerugian) program imbalan pasca kerja/ <i>Gain (loss) on post- employment benefit plan</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
Saldo per 1 Januari 2021	521.073.000.000	13.425.138.372	20.160.000.000	(3.062.485.550)	1.138.151.295	-	(229.211.129.523)	323.522.674.594	73.894.601.420	397.417.276.014	Balance as at January 1, 2021
Setoran modal	24 20.160.000.000	-	(20.160.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	<i>Paid-up capital</i>
Cadangan wajib	26 -	-	-	-	-	46.500.234.923	(46.500.234.923)	-	-	-	<i>Statutory reserve</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(383.291.083)	130.491.028	-	(133.522.940.041)	(133.775.740.096)	17.916.558.425	(115.859.181.671)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2021	541.233.000.000	13.425.138.372	-	(3.445.776.633)	1.268.642.323	46.500.234.923	(409.234.304.487)	189.746.934.498	91.811.159.845	281.558.094.343	Balance as at December 31, 2021
Cadangan wajib	26 -	-	-	-	-	70.761.011.992	(70.761.011.992)	-	-	-	<i>Statutory reserve</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	10.550.330.052	(147.653.623)	-	(174.055.544.528)	(163.652.868.099)	7.543.415.236	(156.109.452.863)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2022	541.233.000.000	13.425.138.372	-	7.104.553.419	1.120.988.700	117.261.246.915	(654.050.861.007)	26.094.066.399	99.354.575.081	125.448.641.480	Balance as at December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		134.129.755.284	126.099.935.689	Receipt from customers
Pembayaran kas kepada:				Cash disbursement to:
Pemasok dan pihak ketiga lainnya		(96.329.130.050)	(73.788.726.354)	Supplier and other third parties
Direksi dan karyawan		(23.302.803.366)	(23.684.972.526)	Board of directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		14.497.821.868	28.626.236.809	Cash generated from operations
Pembayaran beban keuangan	30, 31	(1.131.308.180)	(1.759.368.298)	Payment of finance charge
Pembayaran pajak	11	(15.162.133.983)	(15.624.332.315)	Payment of taxation
Penerimaan pajak	11	24.259.708.005	3.730.059.703	Receipt from tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		22.464.087.710	14.972.595.899	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		192.805.623	76.384.945	Interest received
Penambahan investasi entitas asosiasi	13	(2.060.100.229)	(2.015.235.730)	Investment in an associate addition
Penambahan investasi aset minyak dan gas	16	(26.500.877.144)	-	Investment in oil and gas properties addition
Penambahan aset tetap	15	-	(100.000.000)	Property and equipment addition
Penerimaan piutang	8	-	2.080.000.000	Receipt receivable
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi		(28.368.171.750)	41.149.215	Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang bank jangka panjang	20	(203.268.555)	(36.720.530.624)	Bank loan received - long-term
Penerimaan utang non bank jangka panjang		10.093.594.603	44.354.101.192	Non bank loan received - long-term
Pembayaran utang lain-lain		(13.730.613.139)	(2.048.944.243)	Other loan payment
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(3.840.287.091)	5.584.626.325	Net Cash (Used in) Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH - KAS DAN SETARA KAS		(9.744.371.131)	20.598.371.439	NET INCREASE (DECREASE) - CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		2.086.217.284	(446.650.104)	EFFECT OF CHANGES FOREIGN CURRENCY
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	5	26.295.352.736	6.143.631.401	CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	5	18.637.198.889	26.295.352.736	CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING OF THE YEAR
Transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 38				Non-cash transaction disclosed in Note 38

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Energi yang disingkat PT PPEN (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 05 tanggal 2 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0038298.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 12 tanggal 24 Juni 2022 Hana Badrina, S.H., M.Kn., tentang Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan direksi, Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0135376.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juli 2022.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Perusahaan beralamat di Gedung Plaza PP, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

b. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan adalah menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak Perusahaan di bidang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi, Aktivitas Penunjang Pertambangan, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material, Konstruksi Khusus, Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

c. Pengurus Perusahaan

Sesuai dengan Akta Notaris No. 12 dibuat oleh Notaris Hana Badrina, S.H., M.Kn., tanggal 24 Juni 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Eddy Herman Harun
Ismail Zulkarnain

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pembangunan Perumahan Energi that shortened PT PPEN (the Company) was established based on the Deed of Establishment of the Company of Notary Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., No. 05 dated August 2, 2016 in Jakarta. The Deed of Establishment has been approved by Minister of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0038298.AH.01.01.Tahun 2016 dated August 29, 2016.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 12 dated June 24, 2022 of Hana Badrina, S.H., M.Kn., concerning changes in the purpose and objectives and the Company's business activities and directors, The amendment was approved by Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0135376.AH.01.11.TAHUN 2022 dated July 14, 2022.

The Company's immediate and the ultimate parent Company is PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk incorporated and domiciled in Indonesia.

The Company is located at Plaza PP Building, Jl. Letjen TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

b. Purpose and objectives

The purposes and objectives of the Company in accordance with Article 3 of the Deed of Establishment of the Company is to run business both directly and indirectly through subsidiaries in the sector of Oil and Natural Gas and Geothermal Mining, Mining Support Activities, Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Air Cold, Collection, Treatment and Disposal of Waste and Garbage as well as Material Recovery Activities, Special Construction, Other Special Wholesale Trading, Holding Company Activities, Head Office Activities and Management Consulting.

c. Management of the Company

In accordance with Notarial Deed No. 12 made by Hana Badrina, S.H., M.Kn., dated June 24, 2022, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2022 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dewan Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	H. R. Ario Setyawan	President Director
Direktur	Supriyadi	Director

Sesuai dengan Akta Notaris No. 101 dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

In accordance with Notarial Deed No. 101 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated June 30, 2021, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2021 are as follows:

Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Eddy Herman Harun	President Commissioner
Komisaris	Ismail Zulkarnain	Commissioner
Komisaris	Didik Mardiyanto	Commissioner

Dewan Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	H. R. Ario Setyawan	President Director
Direktur	Supriyadi	Director
Direktur	Lumban Tobing Erick Erland M	Director

d. Entitas anak yang dikonsolidasi

Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham di entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

d. Consolidated subsidiaries

The Company owns more than 50% of shares in subsidiaries as at December 31, 2022 and 2021 consisting of:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Sebelum Eliminasi/ Before Elimination				
						Jumlah Aset/ Total Asset		Jumlah Pendapatan/ Total Revenue		
						31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>										
PT Sepoetih Daya Prima (SDP)	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ Provider of Electricity	2002	75%	75%	162.017.473.175	196.425.115.039	-	-	
PT Odira Energy Karang Agung (OEKA)	Jakarta	Kontraktor eksplorasi minyak dan gas/ Oil and Gas Exploration and Production Contractor	2017	70%	70%	905.104.653.120	824.249.742.889	147.605.695.014	138.699.027.599	
PT Mahkota Dinamika Niaga (MDN)	Jakarta	Penimbunan dan/atau penyimpanan batu bara/ Coal storage business activities	2018	73%	73%	62.598.678.267	61.098.665.755	-	-	

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

a. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

a. Standards, amendments/improvements and interpretation to standard effective in the current year

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian /interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak

In the current year, the Group has applied new standards and a number of amendments/improvements/interpretation to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2022. The adoption of these new/revised

(Lanjutan/Continued)

mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Referensi terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa).

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi;
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, as discussed below.

- *PSAK 22 (amendments) Business Combinations: References to the Financial Reporting Conceptual Framework;*
- *PSAK 57 (amendments) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *2021 Annual Adjustment to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases).*

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standard issued not yet adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- *PSAK 1 (amendments) Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current;*
- *PSAK 16 (amendments) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 25 (amendments) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates;*
- *PSAK 1 (amendments) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments to PSAK 46: Income Tax on Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- *PSAK 74 (amendments) Insurance Contract.*

As at the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

(Lanjutan/Continued)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 Persediaan atau nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared based on the Indonesia Financial Accounting Standard (IFAS) consisting of statement and interpretations of the statement which were issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board the Indonesian Institute of Accountants.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements has been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 Share-based Payment, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 Inventories or value in use in PSAK 48.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to

(Lanjutan/Continued)

untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

c. Dasar konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Basis of consolidated

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether the entity is in fact an investee when facts and circumstances indicate that there has been changes to one or more of the three control elements mentioned above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee, when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

All assets and liabilities in intra Group, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions in the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan non pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham non pengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiary that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali. Seluruh jumlah

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other

(Lanjutan/Continued)

yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- Aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 46 Pajak Penghasilan dan PSAK 24 Imbalan Kerja;
- Instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi; dan
- Aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 Aset tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan diukur sesuai dengan standar tersebut.

comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Business combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- *Deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 46 Income Taxes and PSAK 24 Employee Benefits, respectively;*
- *Liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 53 Share-based Payments at the acquisition date; and*
- *Assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations and are measured in accordance with that standard.*

(Lanjutan/Continued)

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup (termasuk operasi bersama) atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest (including joint operations) in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts

(Lanjutan/Continued)

kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed/sold of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Kombinasi bisnis entitas sependengali

e. Business combination under common control

Kombinasi bisnis entitas sependengali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sependengalian.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and not reclassified to profit or loss when the control is lost.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sependengalian.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

f. Transaction with related parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

Related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- a. A person or a close member have a related to a reporting entity if that person:
 - i. Have joint control or control over the reporting entity;
 - ii. Have significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

(Lanjutan/Continued)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
- b. *An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
- i. The entity and the reporting entity are members of the same group (it means each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a group member which the other entity is the member).*
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. One entities is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity that sponsored the program, so the sponsoring entity are also related to the reporting entity.*
 - vi. Controlled entity or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vii. A person identified in (a) (i) has a significant influence over the entity or key management member of an entity (or parent of the entity).*
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

g. Foreign currency transactions and translation of financial statements

The Group maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rate of exchange prevailing at the time of the transactions.

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut sebagai berikut:

On each balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Bank of Indonesia average rate of exchange at such date, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.731	14.269	United States Dollar (USD) 1

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif.

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statements of comprehensive income.

h. Instrumen keuangan

h. Financial instruments

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

Financial assets are classified in the two categories as follows:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

- Financial assets at amortised cost.
- Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah pengakuan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial recognition.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

(Lanjutan/Continued)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial instruments). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- *Financial assets at amortised cost.*

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- *Financial assets at fair value through profit or loss*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Group has investments in equity instruments, which are classified as financial asset at fair value through profit and loss.

(Lanjutan/Continued)

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Sukuk diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi sebagai beban transaksi sukuk

2. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- Financial assets at amortised cost.
- Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Group's financial liabilities include trade payables, procurement payable, accruals, loans and bonds payable, due to related parties, deposits from customer, and other current and non-current financial liabilities. Financial liabilities are classified as non current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Sharia bond is recognized initially at nominal value, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognized in the profit or loss

(Lanjutan/Continued)

menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk.

as sharia bond transaction costs using the straight-line method during the period of sharia bond.

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai biaya keuangan.

The related return element is charged to the profit or loss as finance cost.

Sukuk, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Sharia bond, adjusted with unamortized premium or discount and transaction costs, is presented as part of liabilities.

3. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

4. Penurunan nilai dari aset keuangan

Untuk piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian ekspektasian sepanjang umur piutang harus diakui sejak pengakuan awal piutang.

4. Impairment of financial assets

For trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies the simplified approach permitted by PSAK 71, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables.

5. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima.

5. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire; or (2) the Group has transferred its contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

6. Nilai wajar instrumen keuangan

Grup menilai instrumen keuangan, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

6. Fair value of financial instruments

The Group measures financial instruments, at fair value at each statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of

(Lanjutan/Continued)

yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Grup melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Grup terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

i. Kas dan setara kas

Kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit risk adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

i. Cash and cash equivalents

Cash on hand, in bank and time deposits with a maturity date of three months or less since the date of placement which are not pledged as collateral, and restricted, are therefore classified as "Cash Equivalents".

(Lanjutan/Continued)

j. Deposito berjangka dan rekening koran bank yang dibatasi penggunaannya

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminan, atau dibatasi penggunaannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatannya disajikan sebagai "aset keuangan lancar lainnya". Rekening bank yang dijaminan atau dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal.

k. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian

j. Time deposits and restricted cash in banks

Time deposits with a maturity date of three months or less since the date of placement which are used as collateral or are restricted, and time deposits with a maturity date of more than three months since the dates of placement are presented as "other current financial assets". Current bank accounts which are used as collateral or are restricted, are presented as restricted cash in bank. Time deposits are stated at nominal values.

k. Investments in associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture) the Group discontinues recognizing its share of further losses. Subsequent losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or

(Lanjutan/Continued)

selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48 Penurunan Nilai Aset ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi atau ventura bersama.

made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investmet in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 48 Impairment of Assets ("PSAK 48") are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with it's carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

(Lanjutan/Continued)

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

Grup menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*.

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

In addition, the Group recorded for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group transacts with an associate entity or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

The Group applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee.

Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

(Lanjutan/Continued)

l. Piutang usaha

Piutang usaha adalah piutang yang timbul atas penjualan/ penyerahan jasa dari kegiatan pokok Grup.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi PPN yang diperhitungkan dan penyisihan penurunan piutang tak tertagih. Pencadangan penurunan nilai piutang terhadap risiko kemungkinan piutang tidak tertagih dilakukan dengan membentuk penyisihan penurunan piutang tak tertagih.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan minyak mentah, bahan kimia dan produk petroleum lainnya, suku cadang dan perlengkapan untuk operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau metode rata-rata. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual yang wajar di dalam proses usaha normal setelah dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya penjualannya yang diperlukan. Cadangan untuk penurunan nilai keusangan persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode/tahun.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

o. Aset tetap

Aset tetap kecuali tanah diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

l. Accounts receivable

Accounts receivable are receivables arising from sales/ deliveries of services of the principal activities of the Group.

Accounts receivable are stated at net realizable value which is equal to the nominal value of the receivables net of VAT and the allowance for doubtful accounts. Provision for impairment of receivables for probable losses of doubtful accounts is made with an allowance for decline in doubtful accounts

m. Inventory

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventories of crude oil, chemicals and other petroleum products, spare parts and equipment for operations are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method or average method. The net realizable value is a reasonable estimate of the selling price in the normal business process after deducting the estimated cost of completion and the estimated cost of its sales. Reserves for impairment of inventory obsolescence are determined based on a review of the condition of each inventory at the end of the period/year.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

o. Property, plant and equipment

Property, plant, and equipment except land are stated at cost less accumulated depreciation.

Land is shown at fair value. Valuation of land is performed by external independent valuers. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

(Lanjutan/Continued)

Tanah tidak disusutkan

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, kecuali untuk bangunan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
- Peralatan berat	8
- Inventaris kantor	4

Biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama tahun dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset ditentukan dengan membandingkan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui di laporan laba rugi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini

Land is not depreciated

Depreciation is computed using the multiple declining balance method except for building, computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the fixed assets as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>	
- Peralatan berat	8	Heavy equipment -
- Inventaris kantor	4	Office equipments -

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the assets will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance costs are charged to the profit or loss during the financial year in which they are incurred.

The asset's residual values, useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period. The effects of any revisions are recognized in the profit or loss, when the changes arise.

Gains and losses on disposals of assets are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in the profit or loss.

Property, plant, and equipment that are no longer used or sold, are removed from the consolidated financial statements. Any resulting gain or loss on disposal of fixed assets are recognized in profit and loss.

Assets under construction is carried at cost including borrowing costs incurred during construction arising from debts used for funding the construction. The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets account when the construction is substantially completed and ready for its intended use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under property, plant and equipment revaluation, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset

(Lanjutan/Continued)

kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

p. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

q. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk

which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

The revaluation surplus in respect of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

p. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

q. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is

(Lanjutan/Continued)

menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

r. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inepsi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

r. Lease

The Group as lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- Terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- Terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga variasi atau dapat disesuaikan, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *Fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *The amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *The lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a variable and adjustable interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*

(Lanjutan/Continued)

- Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen non sewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen non sewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non sewa.

- A lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

(Lanjutan/Continued)

Grup sebagai pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Grup adalah pesewa - antara, Perusahaan mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

The Group as lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When the Group is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Group's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Group applies PSAK 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

s. Income and expense recognition

On January 1, 2020 the Group has adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

(Lanjutan/Continued)

3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan diakui ketika Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi pada waktu tertentu atau sepanjang waktu. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

t. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

Revenue is recognized when the Group satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to the customer, which is when the customer obtains control of the good or service. A performance obligation may be satisfied at a point in time or over time. The amount of revenue recognized is the amount allocated to the satisfied performance obligation.

Expense recognition

Expenses are recognized when they are incurred (*accrual basis*).

t. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

(Lanjutan/Continued)

u. Perjanjian konsesi jasa

Pendapatan Grup hanya berasal dari perjanjian konsesi jasanya. Konstruksi jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, pendapatan dihitung menggunakan metode keuntungan nihil sebesar jumlah pengeluaran yang terjadi dan kemungkinan dapat dipulihkan.

Berdasarkan konsesi jasa Grup, Grup akan menerima beberapa komponen pembayaran untuk jasa yang diberikan, yakni pengembalian biaya modal atas sistem pengendalian air minum, komponen operasi, dan bahan baku serta pengembalian modal atas fasilitas tambahan.

Pendapatan atas konstruksi diakui dengan penetapan estimasi margin konstruksi dari biaya yang dikeluarkan untuk termin penyelesaian sistem pengendalian air minum selama periode berjalan.

Pendapatan keuangan dari konsesi jasa mencerminkan pendapatan bunga atas piutang dari perjanjian konsesi jasa, yang diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, kecuali jika besar kemungkinan akan meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal.

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

u. Service concession arrangement

The income of the Group comes from services concession agreements. Construction services related to service concession agreements are recognized as income in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" by using the percentage of completion method. If the outcome of a construction contract can not be estimated reliably, revenue is calculated using the method nil profit amount and possible expenses incurred can be recovered.

Based on service concession of the Group, the Group will receive some of the components of the payment for services rendered, namely the return of capital costs on drinking water control systems, operating components, and raw materials as well as return of capital on additional amenities.

Revenue from construction are recognized by the determination of the estimated margin of the construction costs incurred for the settlement terms of drinking water control systems during the period.

Financial income from service concession reflects the interest income on receivables from service concession arrangement, which is recognized using the effective interest method.

Maintenance and repair expense

The cost of maintenance and repair services in connection with the concession agreement is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, except when it is likely to increase in the future economic benefits and can be measured reliably.

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

(Lanjutan/Continued)

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

v. Aset minyak dan gas bumi

Biaya pengeboran sumur pengembangan dan sumur tes stratigrafi tahap pengembangan, platform, perlengkapan sumur dan fasilitas produksi terkait, dikapitalisasi sebagai aset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan. Biaya tersebut dipindahkan ke aset sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait pada saat pengeboran atau konstruksi selesai.

Penyusutan, depleksi dan amortisasi atas aset minyak dan gas bumi, kecuali untuk aset sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan, dihitung dengan menggunakan metode satuan unit produksi, dengan menggunakan produksi kotor yang dibagi dengan cadangan kotor yang

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or another body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public-to-private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*
- *The operator is obligated to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

v. Oil and gas properties

The costs of drilling development wells and development-type stratigraphic test wells, platforms, well equipment and attendant production facilities, are capitalized as uncompleted wells, equipment and facilities. Such costs are transferred to wells and related equipment and facilities upon completion.

Depreciation, depletion and amortization of oil and gas properties, except uncompleted wells, equipment and facilities, are calculated based on the unit-of-production method, using the gross production divided by gross proved developed reserves. Depreciation for support

(Lanjutan/Continued)

terbukti dan telah dikembangkan. Penyusutan atas fasilitas pendukung dan peralatan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

facilities and equipment is calculated using straight line method.

w. Aset eksplorasi dan evaluasi

Beban eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur eksplorasi termasuk biaya pengeboran sumur tes stratigrafi tahap eksplorasi, dan biaya lainnya yang terkait untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi dikapitalisasi dan disajikan terpisah sebagai Aset Eksplorasi dan Evaluasi di laporan posisi keuangan konsolidasian.

w. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation expenditures including geological and geophysical costs, costs of drilling exploratory wells, including the costs of drilling exploratory-type stratigraphic test wells, and other costs in relation to evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting oil and gas are capitalized and presented separately as Exploration and Evaluation Assets in the consolidated statement of financial position.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan izin penambangan untuk entitas anak yang bergerak di bidang tambang batu bara dibebankan pada saat terjadinya.

The costs incurred before the acquisition of mining license for subsidiaries engaged in coal mining are expensed when incurred.

Jika tidak ditemukan potensi cadangan yang secara ekonomis dapat diperoleh, aset eksplorasi dan evaluasi dihapus melalui laba rugi sebagai sumur kering. Jika cadangan terbukti ditemukan dan layak dikembangkan tergantung pada aktivitas penilaian lebih lanjut, pengeluaran disajikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi pada saat kegiatan mengevaluasi kelayakan tersebut sedang berlangsung.

If no potentially commercial hydrocarbons are discovered, the exploration asset is written off through profit or loss as a dry hole. If extractable hydrocarbons are found and, subject to further appraisal activity, it is probable that they can be commercially developed, the costs continue to be carried as an exploration and evaluation asset while progress is made in assessing the commerciality of the hydrocarbons.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

The recoverability of exploration and evaluation assets depends on the successful development and commercial exploitation in such area (area of interest). Exploration and evaluation assets are tested for impairment if certain facts and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable value. In such conditions, the entity must measure, present and disclose the impairment loss as required under PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "Properti pertambangan" dan "Aset minyak dan gas bumi" pada akun "Aset minyak dan gas bumi dan properti pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

The exploration and evaluation assets are transferred to "Mining properties" and "Oil and gas properties" in the "Oil and gas assets and mining properties" account after the mining area is determined to have commercial reserves for further development.

x. Liabilitas imbalan pasca kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Ketenagakerjaan").

x. Post-employment benefits liabilities

The Group provides defined post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law").

(Lanjutan/Continued)

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), diakui langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam "saldo laba" tidak direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amandemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga neto;
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

y. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam production sharing contract ("PSC") atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset minyak dan gas bumi dan restorasi area aset diakui sebagai komponen biaya perolehan, yang disusutkan/didepresiasi dengan menggunakan metode satuan unit produksi yang sejalan dengan tarif depleksi aset yang dipilih.

Pada umumnya, aktivitas pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait baru akan terjadi beberapa tahun kemudian di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area ("ARO") di masa yang akan datang adalah berupa estimasi

The cost of providing benefits is determined using the *projected unit credit* method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement comprising actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements recognized in other comprehensive income are reflected immediately in "retained earnings" not reclassified. Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier. Net interest is calculated by applying a discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);
- Net interest expense or income;
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

y. Asset abandonment obligation and site restoration

The Group recognises its obligations for future dismantlement and transfer of assets and site restoration of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets in accordance with the provisions in the production sharing contracts ("PSC") or in accordance with applicable regulations.

The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognised as part of the acquisition costs of the assets and are subsequently depreciated/depleted using the unit of production method in line with the depletion rate of the selected assets.

In most instances, the dismantlement and transfer of assets and site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets will occur many years in the future. The provision for future dismantlement and transfer of assets and asset restoration obligation ("ARO") is the best estimate of the present value of the future

(Lanjutan/Continued)

terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan. Perkiraan liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi area di masa yang akan datang tersebut melibatkan estimasi manajemen mengenai saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas tersebut harus dilakukan, dan juga teknologi yang akan digunakan di masa depan.

Estimasi tersebut direviu setiap periode/tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian dicerminkan dalam nilai kini atas provisi liabilitas pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi area pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dimana juga dilakukan penyesuaian dengan jumlah yang sama atas nilai buku aset yang bersangkutan.

Pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi diakui sebagai beban keuangan.

z. Pajak penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba

expenditure required to undertake the dismantlement and transfer of assets and site restoration obligation at the reporting date, based on current legal requirements. The estimated future dismantlement and transfer of assets and site restoration obligation, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of removal and transfer, the extent of restoration activities required and future removal and restoration technologies.

Such estimates are reviewed on a periodical/annual basis and adjusted each period/year as required. Adjustments are reflected in the present value of the dismantlement and transfer of assets and site restoration obligation provision at the consolidated statement of financial position date with a corresponding change in the book value of the associated asset.

The unwinding of the effect of discounting the provision is recognised as a finance cost.

z. Income tax

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in

(Lanjutan/Continued)

kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

(Lanjutan/Continued)

aa. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

bb. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut

aa. Operating segment

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. That engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

bb. Events after the reporting period

Events after the reporting period presents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period which are not adjusting events are disclosed in the consolidated notes to the financial statements when material.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period

(Lanjutan/Continued)

direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai PSAK 25

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal disaat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgments in applying accounting policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors according to PSAK 25

The error of the previous period is the omission to include, and errors in the records, in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse reliable information that:

- *Available when the completion of the financial statement for such period; and*
- *Rationally expected to be obtained and used in the preparation and presentation of financial statement. Such errors include the impact of errors of mathematical calculations, error of the application of the accounting policy, error or misinterpretation of facts and fraud.*

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole rational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- *The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*
 1. *Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and*
 2. *Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

(Lanjutan/Continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 15.

Penurunan nilai goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

Key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Impairment loss on loans and receivables

The Company assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Estimated useful lives of property and equipment

The useful life of each item of the Company's property and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of property, plant and equipment are disclosed in Notes 15.

Impairment of goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise.

(Lanjutan/Continued)

Pengakuan pendapatan konsesi jasa dari konstruksi

Perusahaan mengakui pendapatan konsesi jasa dari konstruksi berdasarkan nilai beban konstruksi ditambah marjin tertentu. Marjin ditentukan berdasarkan estimasi penilaian pasar untuk proyek yang serupa.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam Penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Pajak tangguhan dari perbedaan antara pendapatan dari entitas asosiasi dan dividen yang diterima dari entitas asosiasi telah diakui karena manajemen tidak dapat mengontrol distribusi dividen dan transaksi permodalan lainnya dan laba kena pajak sulit untuk diestimasi.

The recognition of revenue from construction service concession

The Company recognizes revenue from construction service concession based on the value of construction load plus a certain margin. Margins are determined based on estimates of the market for similar projects.

Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Income tax

The calculation of income tax expense the Company requires judgement and assumptions in determining the specific load reduction during the estimating process. All management judgement and estimates are made questionable by the Directorate General of Taxation. As a result, there is uncertainty in the determination of tax. Resolution of tax positions taken by the Company, through negotiation with the relevant tax authorities can last for years and are very difficult to predict the outcome. If there are differences in the calculation of the tax amount already recorded, such differences will impact the income tax and deferred tax year in which the determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses and temporary differences are recognized if it is considered more likely than not that they can be readmitted, where this depends on the adequacy of the formation of the taxable income in the future. Assumed the formation of the taxable income is strongly influenced by management estimates and assumptions on the level of sales and related costs that there is a risk of uncertainty, so that there is the possibility of changes in estimates and assumptions will change the projected taxable income in the future.

Deferred tax on the difference between income from associates and dividends received from the associate has been recognized since management can not control the distribution of dividends and other capital transactions also taxable income is difficult to estimate.

(Lanjutan/Continued)

Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Perusahaan mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas bumi, area tambang batu bara, dan fasilitas dan infrastruktur terkait. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto dan biaya yang diharapkan untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area.

Estimasi cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai ditahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada, misalnya terkait dengan harga dan biaya pada tanggal estimasi tersebut dibuat. Cadangan terbukti meliputi:

1. Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.
2. Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi reservoir, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perusahaan dalam berbagai cara, diantaranya:

1. Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.

The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

Liability of asset abandonment and site restoration obligations

The Company has recognized provision for asset abandonment and site restoration obligations associated with its oil and gas wells, facilities and infrastructure. In determining the amount of the provision, assumptions and estimates are required in relation to discount rates and the expected cost to dismantle and remove all the structures from the site and restore the site.

Reserve estimates

Proved oil and gas reserves are the estimated quantities of crude oil and natural gas which geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from known reservoirs under existing economic and operating conditions. Proved reserves include:

1. *Undeveloped proved reserves: amounts of hydrocarbons that are expected to be retrieved following new drilling, facilities and operating methods.*
2. *Undeveloped proved reserves: amounts of hydrocarbons that are expected to be retrieved following new drilling, facilities and operating methods.*

The accuracy of proved reserve estimates depends on a number of factors, assumptions and variables such as: the quality of available geological, technical and economic data, results of drilling, testing and production after the date of the estimates, the production performance of the reservoirs, production techniques, projecting future rates of production, the anticipated cost and timing of development expenditures, the availability for commercial market, anticipated commodity prices and exchange rates.

As the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year, and additional geological data are generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in reported reserves may affect the Company financial results and financial position in a number of ways, including:

1. *Depreciation and amortization which are determined on a unit of production basis, or where the useful economic lives of assets change.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

2. Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.

2. Decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Kas			Cash on Hand
Rupiah	14.965.025	82.296.372	Rupiah
Bank			Banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.966.833.830	2.783.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	224.696.773	7.757.563.996	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	32.588.132	204.307.095	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	2.345.000	-	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT HSBC Indonesia	-	27.102.379	PT HSBC Indonesia
PT BNI (Persero), Tbk	-	275.000	PT BNI (Persero), Tbk
USD			USD
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	12.512.180.484	13.177.439.958	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	11.662.649	11.083.881	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.674.267	3.709.939	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT HSBC Indonesia	-	60.065.805	PT HSBC Indonesia
Jumlah Bank	16.752.981.135	21.244.331.053	Total Banks
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(14.695.086)	(21.664.829)	Allowance of expected credit loss
Jumlah Bank - Bersih	16.738.286.049	21.222.666.224	Total Bank - Net
Deposito			Time Deposit
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1.864.697.367	5.022.438.356	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
PT Bank Bukopin, Tbk	50.000.000	50.000.000	PT Bank Bukopin, Tbk
Jumlah Deposito	1.914.697.367	5.072.438.356	Total Deposito
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(30.749.552)	(82.048.216)	Allowance of expected credit loss
Jumlah Deposito - Bersih	1.883.947.815	4.990.390.140	Total Deposito - Net
Jumlah	18.637.198.889	26.295.352.736	Total

Jangka waktu deposito berjangka Rupiah 1 dan 3 bulan/month Rupiah time deposits period

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah 5,5 % dan 4,5 % per tahun/per annum Annual interest rate of Rupiah time deposits

6. PIUTANG USAHA

Merupakan piutang usaha kepada PT Pertamina (Persero) atas tagihan lifting minyak PT OEKA (entitas anak) pada tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp.10.155.328.673 dan Rp.10.380.420.002.

6. TRADE RECEIVABLES

Represents trade receivables to PT Pertamina (Persero) for oil lifting claims of PT OEKA (subsidiary) in 2022 and 2021, amounting to Rp.10,155,328,673 and Rp.10.380.420.002, respectively.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

7. ASET KEUANGAN ATAS PROYEK KONSESI

7. FINANCIAL ASSET FOR CONCESSION PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	194.713.000.000	219.254.000.000	<i>Beginning balance</i>
Penambahan:			<i>Additions:</i>
Pendapatan bunga dari jasa konsesi	-	-	<i>Interest revenue from service concession</i>
Pengurangan:			<i>Less:</i>
Penurunan nilai	(32.799.000.000)	(24.541.000.000)	<i>Impairment</i>
Penerimaan dari PLN	-	-	<i>Received from PLN</i>
Saldo Akhir	161.914.000.000	194.713.000.000	<i>Ending Balance</i>
Dikurangi bagian lancar piutang usaha - aset keuangan atas jasa konsesi telah difaktur	-	-	<i>Less current portion trade receivables - financial asset for concession project</i>
Belum difaktur	19.356.232.000	-	<i>Unbilled</i>
Jumlah Bagian Lancar	19.356.232.000	-	<i>Total Current Portion</i>
Bagian Tidak Lancar	142.557.768.000	194.713.000.000	<i>Non Current Portion</i>

Akun ini merupakan nilai aset keuangan dari proyek konsesi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung 2x6 MW sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum masa depan kepada PT PLN (Persero) yang tercantum dalam PPA yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16 sesuai dengan berita acara COD tanggal 2 Mei 2014.

This account consists financial assets of the concession project of Coal Fired Power Plant (PLTU) Central Lampung 2x6 MW in relation with the future minimum capacity payments to PT PLN (Persero) set forth in PPA that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16 based on the minutes of COD dated May 2, 2014.

Perusahaan menelaah secara berkala atas jumlah nilai tercatat aset keuangan konsesi dan memastikan bahwa jumlah nilai tercatat tidak melebihi nilai wajar, berdasarkan laporan penilai independen pada tahun 2022 yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Guntur, Eki, Andri dan Partner Cabang Jakarta dengan No. 00002/2.116-6/BS/02/0511/1/1/2023, pada tanggal 9 Januari 2023. Penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin No. B-1.18.00511 dan OJK dengan No. STTD.PB-51/PM.223/2021. Dan berdasarkan laporan penilai independen pada tahun 2021 yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan pada tanggal 28 Januari 2022. Penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin No. 2.09.0074 dan OJK dengan No. STTD.PPB- 10/PM.2/2018.

The Company periodically reviews the carrying amount of the concession financial assets and ensures that the carrying amount does not exceed the fair value, based on the independent appraisal report in 2022 which has been registered with OJK, KJPP Guntur, Eki, Andri and Partner Jakarta Branch with on No. 00002/2.116-6/BS/02/0511/1/1/2023, on January 9, 2023. Independent appraisers who have been registered with the Ministry of Finance with license number No. B-1.18.00511 and OJK with No. STTD.PB-51/PM.223/2021. And based on the independent appraiser report in 2021 that has been registered at OJK, KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo and Partners on January 28, 2022. Independent appraisers who have been registered at the Ministry of Finance with license number No. 2.09.0074 and OJK with No. STTD.PPB- 10/PM.2/2018.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

Movement in the allowance for impairment losses

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal tahun	49.415.811.619	24.874.811.619	<i>Balance at beginning of year</i>
Pengakuan kerugian penurunan piutang	32.799.000.000	24.541.000.000	<i>Impairment losses recognized on receivables</i>
Jumlah	82.214.811.619	49.415.811.619	<i>Total</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses from third parties is adequate.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Selama tahun 2022 Perusahaan tidak memproduksi dikarenakan harga jual batubara yang dibayarkan oleh PT PLN (Persero) lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya. Saat ini Perusahaan sedang dalam negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk penyesuaian tarif baru (Lihat Catatan 34).

During 2022 the Company is not producing because of the selling price of coal paid by PT PLN (Persero) is lower than the purchase price. Currently the Company is in the negotiation process with PT PLN (Persero) for a new tariff adjustment (See Note 34).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT Sa Ary Indoraya	75.571.480.000	-	PT Sa Ary Indoraya
PT Inpola Meka Energi	31.806.023.056	30.464.466.667	PT Inpola Meka Energi
PT Meulaboh Power Generation	27.986.000.000	27.986.000.000	PT Meulaboh Power Generation
PT PP (Persero) Tbk Div EPC	27.404.284.730	27.404.284.730	PT PP (Persero) Tbk Div EPC
Karyawan	306.211.917	215.373.845	Employees
Jumlah	163.073.999.703	86.070.125.242	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(32.336.918.939)	(13.704.915.615)	Allowance of expected credit loss
Jumlah	130.737.080.764	72.365.209.627	Total

Piutang kepada PT Sa Ary Indoraya merupakan piutang atas penjualan saham PT MDP sebesar 86% dari jumlah saham, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 27 Desember 2019 dan Akta jual beli tanggal 17 Februari 2020.

Receivable to PT Sa Ary Indoraya represents receivable of PT MDP's shares sales amounted 86% of total shares, in accordance with Conditional Share Sale and Purchase Agreement dated December 27, 2019 and the Deed of sale and purchase dated February 17, 2020.

Berdasarkan Surat Permohonan Jadwal Pembayaran Atas Pengambilalihan Saham PT MDP No. Ref:002/SK/SAI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, dan Surat Jawaban Permohonan Penyesuaian Jadwal Pembayaran atas pengambilalihan saham PT MDP No. 355/EXT/DFPM/PPE/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021. Perusahaan sepakat pelunasan atas pengambilalihan saham PT MDP akan dilunasi hingga Desember 2023.

Based on the Request for Payment Schedule for the Acquisition of PT MDP Shares No. Ref: 002/SK/SAI/XII/2021 dated December 6, 2021, and the Answer to the Request for Adjustment of the Payment Schedule for the acquisition of PT MDP shares No. 355/EXT/DFPM/PPE/XII/2021 dated December 14, 2021. The Company agreed that the settlement of the takeover of PT MDP's shares will be paid in full until December 2023.

Pada tahun 2022 piutang lain-lain kepada PT Sa Ary Indoraya direklasifikasi menjadi piutang lain-lain jangka Pendek.

In 2022 other receivables from PT Sa Ary Indoraya were reclassified into other short-term receivables.

Piutang kepada PT Meulaboh Power Generation merupakan piutang modal kerja tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 9,5%, sesuai Addendum No. 03 perjanjian pinjam meminjam No. 419A/PPM/PPE-MPG-XII/2019 tanggal 25 Oktober 2022 dengan jangka waktu pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023.

Receivable to PT Meulaboh Power Generation represent unsecured working capital receivables and bear interest at 9.5%, according to Addendum No. 03 of the loan agreement No. 419A/PPM/PPE-MPG-XII/2019 dated October 25, 2022 with a loan term that will mature as at December 20, 2023.

Piutang lain-lain kepada PT Inpola Meka Energi merupakan piutang pinjaman modal kerja tanpa jaminan untuk kegiatan operasional, dengan tingkat bunga sebesar 12%, dengan jangka waktu pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025.

Other receivable from PT Inpola Meka Energi represent unsecured working capital loans for operational activities, with an interest rate of 12%, with a loan term that will mature as at December 18, 2025.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Piutang lain-lain kepada karyawan merupakan pinjaman karyawan PT OEKA, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga dan dipotong dari pembayaran gaji setiap bulannya.

Other receivables to employees represent loans of PT OEKA employees, unsecured and not subject to interest and deducted from monthly salary payments.

Piutang kepada PT PP (Persero) Tbk Divisi EPC merupakan piutang atas klaim biaya operasi Perusahaan.

Receivable to PT PP (Persero) Tbk EPC Division represents receivable for claims for operating expenses.

9. PERSEDIAAN

Persediaan sehubu Desember 2022 dan 2021 masing-masing sejumlah Nihil dan Rp.368.258.300 Merupakan persediaan batubara, suku cadang mesin dan solar Perusahaan untuk bahan bakar dan perbaikan PLTU 2X6 MW di Lampung Tengah per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

9. INVENTORIES

Inventories as at December 31, 2022 and 2021 amounting to Nil and Rp.368,258,300, respectively, represent inventories of coal, engine parts and diesel fuel for fuel and repair of 2X6 MW PLTU in Central Lampung as at December 31, 2022 and 2021, consisting of:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Suku cadang	-	193.314.000	Sparepart
Batubara	-	171.344.300	Coal
Solar	-	3.600.000	Diesel fuel
Jumlah	-	368.258.300	Total

Pada tahun 2022, manajemen memutuskan untuk melakukan penghapusan persediaan batubara berdasarkan berita acara penghapusan batubara No. 07/SDP-INT/BA/XII/2022 dan berita acara penghapusan persediaan suku cadang No. 06/SDP-INT/BA/XII/2022 yang sudah diketahui dan disetujui oleh pihak direksi atas penghapusan tersebut, serta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik per 31 Desember 2022. Kondisi persediaan sudah tidak dapat digunakan karena terdapat keusangan akibat kondisi kelembaban cuaca dan lainnya pada PLTU Lampung Tengah.

In 2022, management decided to write off coal inventory based on the minutes of coal write-off No. 07/SDP-INT/BA/XII/2022 and minutes of spare parts inventory write-off No. 06/SDP-INT/BA/XII/2022 which have been known and approved by the board of directors for the write-off, and based on the results of physical inspection as at December 31, 2022. The condition of the inventory cannot be used because there is obsolescence due to weather humidity conditions and others at the Central Lampung PLTU.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Uang muka proyek	9.789.613.139	5.892.633.520	Project advance
Uang muka pemasok	744.067.510	1.130.811.774	Vendor advance
Dana kerja	739.738.175	683.273.017	Working fund
Bonus peralatan	157.310.000	142.690.050	Equipment bonus
Asuransi	20.509.292	221.504.580	Insurance
Jumlah	11.451.238.116	8.070.912.941	Total

Uang muka proyek terdiri dari uang muka atas pekerjaan proyek pengeboran sumur baru di Sumur Ridho pada tahun 2022 sebesar Rp.9.789.613.139 dan uang muka atas pembayaran paket diesel generator di PT OEKA (entitas anak) terkait pekerjaan work over sumur minyak per 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.892.633.590.

Project advances consist of advances for the drilling of new wells at Sumur Ridho in 2022 amounting to Rp.9,789,613,139 and advances for payments for diesel generator packages at PT OEKA (subsidiary) related to work over oil Dwells as at December 31, 2021 in the amount of Rp.5,892,633,590.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Uang muka pemasok merupakan uang muka atas biaya-biaya yang dibayarkan terkait pekerjaan pelaksanaan proyek di PT Mahkota Dinamika Niaga (entitas anak) per 31 Desember 2022.

Vendor advance represent advance fund on costs paid related to the project implementation in PT Mahkota Dinamika Niaga (subsidiary) as at December 31, 2022.

Dana kerja merupakan dana yang dibayarkan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di PT Odira Energy Karang Agung (entitas anak) sesuai dengan ketentuan pasal 5.3.3. kontrak bagi hasil. Jumlah dana kerja minimal yang harus ada sebelum pembahasan program kerja tahunan adalah USD.75.000.

Working fund represent funds paid to Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK MIGAS) in PT Odira Energy Karang Agung (subsidiary) in accordance with article 5.3.3. production sharing contracts. Minimum amount of working fund that must exist before the discussion of the annual work program is USD.75,000.

Biaya bonus peralatan adalah biaya yang dibayarkan PT Odira Energy Karang Agung (entitas anak) kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan migas di blok Karang Agung sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil pasal 8.2 yaitu bonus peralatan. Pengakuan biaya bonus seluruhnya pada saat produksi minyak tercapai dalam satu tahun penuh.

Equipment bonus costs are fees paid by PT Odira Energy Karang Agung (subsidiary) to the Government of Indonesia to acquire management rights Karang Agung block oil and gas in accordance with the provisions of the Production Sharing Contract on clause 8.2 is equipment bonus. Recognition bonus expense entirely of petroleum production is reached in a full year.

Asuransi dibayar dimuka merupakan asuransi yang dibayarkan kepada PT Asuransi Jasindo terhadap sumur dan fasilitas produksi yang terletak di Karang Agung, Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 di PT OEKA (entitas anak) dan asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2021 atas asuransi atas alat berat yang dibayarkan kepada PT Surya Artha Nusantara Finance per 31 Desember 2020 di PT Sepoetih Daya Prima (entitas anak) sebesar Rp.200.000.000.

Prepaid insurance represent insurance payment paid to PT Asuransi Jasindo for wells and production facilities located in Karang Agung, Sumatera Selatan as at December 31, 2022 and prepaid insurance as at December 31, 2021 for insurance of heavy equipment paid to PT Surya Artha Nusantara Finance as at December 31, 2020 in PT Sepoetih Daya Prima (subsidiary) amounting to Rp.200,000,000.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PPN Masukan	70.026.466.130	78.586.644.397	VAT In
PPH Pasal 22	-	703.289.729	Income Tax Article 22
PPH Pasal 25	-	7.386.505	Income Tax Article 25
Jumlah	70.026.466.130	79.297.320.631	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 21	2.041.286.337	1.875.511.580	Article 21
Pasal 22	108.955.119	228.920.233	Article 22
Pasal 23	2.248.600.842	2.802.453.296	Article 23
Pasal 4 Ayat 2	155.309.971	51.538.266	Article 4 (2)
Pasal 26	40.000.000	40.000.000	Article 26
PPN Keluaran	17.718.535.133	14.705.671.291	VAT Out
Utang denda pajak	2.581.068.317	-	Tax penalty payable
SKP dan STP	395.002.685	722.396.927	SKP and STP
Jumlah	25.288.758.404	20.426.491.593	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Terdiri dari:			Consist of:
Perusahaan	83.078.429	32.786.277	The Company
Entitas anak	25.205.679.975	20.393.705.316	Subsidiaries
Jumlah	25.288.758.404	20.426.491.593	Total
c. Pajak penghasilan badan			c. Corporate income tax
Rincian beban pajak adalah sebagai berikut:			The details of tax expense are as follows:
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pajak kini:			Current tax:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	Subsidiaries
Sub Jumlah	-	-	Sub Total
Pajak tangguhan:			Deferred tax:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	Subsidiaries
Sub Jumlah	-	-	Sub Total
Jumlah	-	-	Total
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Laba sebelum pajak			Profit before tax
Konsolidasian	(170.998.216.448)	(115.544.925.095)	Consolidated
Penyesuaian konsolidasi	21.608.876.907	27.011.095.673	Consolidation adjustment
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	(50.503.977.722)	(44.179.201.845)	PT Sepoetih Daya Prima
PT Odira Energy Karang Agung	54.135.037.728	101.087.159.988	PT Odira Energy Karang Agung
PT Mahkota Dinamika Niaga	(1.231.356.481)	(2.866.248.046)	PT Mahkota Dinamika Niaga
Perusahaan	(195.006.796.880)	(196.597.730.865)	The Company
Beda tetap:			Fixed different:
Beban pegawai	15.054.330.540	10.512.973.457	Employees expense
Beban umum	2.868.162.449	3.004.247.512	General expense
Beban penyusutan	-	148.666.112	Depreciation expense
Beban pemasaran	699.622.849	471.192.162	Marketing expense
Pendapatan bunga	(2.970.557.470)	(5.234.508.264)	Interest income
Beban administrasi bank	11.758.055	14.911.578	Foreign exchange
Selisih kurs	(2.528.151)	1.007.067	Bank charges expense
Rugi entitas asosiasi	(4.311.329.718)	3.739.732.512	Loss from associated Company
Beban bunga aset hak guna	-	7.076.514	Interest expenses on use rights assets
Beban lain-lain	183.657.338.325	183.932.432.215	Others expense
Laba (Rugi) Fiskal			Profit (Loss) Fiscal
Tahun Berjalan	-	-	Current Year
Akumulasi Laba (Rugi) Fiskal - Akhir Tahun	-	-	Accumulated Profit (loss) Fiscal - Ending of Year
Beban pajak kini:			Current tax expense:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	-	-	PT Sepoetih Daya Prima
Jumlah	-	-	Total
Dikurangi - Uang muka PPh:			Less - Income tax advance:
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak:			Subsidiaries:
PT Sepoetih Daya Prima	-	710.676.234	PT Sepoetih Daya Prima
Jumlah	-	710.676.234	Total
Pajak penghasilan badan kurang (lebih) bayar	-	(710.676.234)	Corporate income tax under (over) payment

(Lanjutan/Continued)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Perusahaan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Jika terdapat perbedaan antara laba kena pajak yang diakui sebelumnya dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dicatat sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan diakui pada tahun berjalan saat SPT dilaporkan.

Pajak tangguhan

Perusahaan dan entitas anak tidak memperhitungkan manfaat (beban) pajak tangguhan dan aset (liabilitas) pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dikarenakan belum ada keyakinan memadai akan terpulihkan dimasa yang akan datang.

d. Administrasi perpajakan

Perubahan tarif pajak badan

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 07 Tahun 2021 ("UU No. 07/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 07/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 07/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;

The corporate income tax calculation for the year ended in December 31, 2022, is a preliminary estimation made for accounting purpose and subject to revision when the Company submit its Annual Corporate Income Tax Return.

If there is a difference between the previously recognized taxable profit and the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) it is recorded as an adjustment for the previous year and is recognized in the current year when the SPT was reported.

Deferred tax

The Company and subsidiaries does not take into account the deferred tax benefits (expenses) and deferred tax assets (liabilities) for the years ended December 31, 2022 and 2021 because there is no sufficient assurance that they will be recovered in the future.

d. Tax administration

Change in tax rates

On October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 07 Year 2021 ("Law No. 07/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No. 07/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing Taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No. 07/2021, among others, are as follows:

- a. *The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;*
- b. *VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;*
- c. *Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services which also applies from April 1, 2022;*

(Lanjutan/Continued)

d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis asset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

Penerapan UU No. 07/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

e. Surat ketetapan pajak

PT SDP

Tahun fiskal 2019

Pada 13 Juli 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan pasal 25 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.344.214.539. SKPLB atas PPh 22 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.251.268.796 dan PPh 25 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.92.945.743. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.428.784.524. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.2.641.117. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 untuk masa pajak Januari - Desember 2019 senilai Rp.115.405.043. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 untuk masa pajak Januari-Desember 2019 senilai Rp.30.979.942.

PT OEKA

Pada tahun 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk masa pajak Januari - Desember 2018 atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp.62.811.033, pasal 4 (2) Rp.831.983.222, dan PPN sebesar Rp.1.269.838.449.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk masa pajak Januari-Desember 2019 atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar Rp.235.890.427, pasal 4 (2) Rp.108.398.800, dan PPN sebesar Rp.63.527.683.

d. Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 - June 30, 2022, on the basis of assets acquired during January 1, 1985 - December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.

The implementation of Law No. 07/2021 affect the measurement of deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2022 which were measured using the applicable tax rate of 22%.

e. Tax assessments

PT SDP

2019 Fiscal year

On July 13, 2021, the Company received a tax assessment letter ("SKPLB") on Income Tax (PPh) article 22 and article 25 for the tax period January - December 2019 amounting to Rp.344,214,539. SKPLB on PPh 22 for the January - December 2019 tax period of Rp.251,268,796 and PPh 25 for the January - December 2019 tax period of Rp.92,945,743. The Company received a Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") for Value Added Tax (VAT) for the tax period January-December 2019 amounting to Rp.428,784,524. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for Income Tax (PPh) article 21 for the tax period January - December 2019 amounting to Rp.2,641,117. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for Income Tax (PPh) article 23 for the tax period January-December 2019 amounting to Rp.115,405,043. The Company received an underpaid tax assessment letter ("SKPKB") for the final Income Tax (PPh) article 4 paragraph 2 for the tax period January-December 2019 in the amount of Rp.30,979,942.

PT OEKA

In 2022, the Company received an Underpaid Tax Assessment Letter ("SKPKB") for the January - December tax period. 2018 on Income Tax (PPh) article 21 amounting to Rp.62,811,033, article 4 (2) amounting to Rp.831,983,222, and VAT amounting to Rp.1,269,838,449.

In 2021, the Company received an Underpaid Tax Assessment Letter ("SKPKB") for the January-December 2019 tax period on Income Tax (PPh) article 23 amounting to Rp.235,890,427, article 4 (2) amounting to Rp.108,398,800, and VAT amounting to Rp.63,527,683.

(Lanjutan/Continued)

f. Persetujuan penghapusan sanksi dan persetujuan pengangsuran pajak

PT SDP

Pada tahun 2022, Perusahaan telah mendapatkan keringanan penghapusan sanksi administrasi karena permohonan wajib pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa No. 00343/107/19/009/21 tanggal 5 Juli 2021 Masa Pajak Desember 2019; atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Final 4(2) No. 00041/240/19/009/21 tanggal 5 Juli 2021 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2019; atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00340/107/19/009/21 tanggal 5 Juli 2021 Masa Pajak Juli 2019; atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00338/107/19/009/21 tanggal 5 Juli 2021 Masa Pajak Mei 2019; atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00339/107/19/009/21 tanggal 5 Juli 2021 Masa Pajak Juni 2019.

Berdasarkan surat No. KEP-0001/ANGSUR/KPP.200804/2023 Perusahaan mendapatkan keringanan pembayaran angsuran atas pembayaran pajak dari SKPKB No. 00032/203/19/009/21 (Masa/Tahun*) Pajak 12/2019 yang jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp.2.581.068.317 dengan total angsuran sebesar Rp.107.544.513 perbulan.

f. Sanction removal agreement and tax installment agreement

PT SDP

In 2022, the Company has received relief from the elimination of administrative sanctions due to taxpayers' requests for Goods and Services VAT Tax Collection Letter No. 00343/107/19/009/21 dated July 5, 2021 for the tax period of December 2019; for Tax Assessment Letter for Underpayment of Final Income Tax 4(2) No. 00041/240/19/009/21 dated July 5, 2021 for the tax period of January to December 2019; on Goods and Services Value Added Tax Collection Letter No. 00340/107/19/009/21 dated July 5, 2021 Tax Period July 2019; on Goods and Services Value Added Tax Collection Letter No. 00338/107/19/009/21 dated July 5, 2021 Tax Period May 2019; on Goods and Services Value Added Tax Collection Letter No. 00339/107/19/009/21 dated July 5, 2021 Tax Period June 2019.

Based on letter No. KEP-0001/ANGSUR/KPP.200804/2023, the Company received relief for installment payments on tax payments from SKPKB No. 00032/203/19/009/21 (Period/Year*) Tax 12/2019 which is due on August 4, 2021 in the amount of Rp.2,581,068,317 with a total installment of Rp.107,544,513 per month.

12. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK BERELASI

	31 Desember/ December 31, 2022
PT Muba Daya Pratama	261.999.240.411
PT Sa Ary Indoraya	-
Surya Mina Asinusa – KSO	2.225.311.049
PT Asinusa Putra Sekawan	438.457.013
Alm. Bapak Rahardjo	5.000.000.000
Jumlah	269.663.008.473
Penyisihan piutang	
Alm. Bapak Rahardjo	(5.000.000.000)
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(100.903.824.634)
Jumlah	163.759.183.839

Piutang kepada PT Muba Daya Pratama (MDP) merupakan piutang modal kerja per 31 Desember 2019 yang diberikan kepada PT MDP sejak tahun 2016, pada saat PT MDP masih menjadi entitas anak Perusahaan, setelah di kurangi utang PT OEKA (entitas anak) kepada PT MDP berdasarkan surat berita acara kesepakatan antara PT OEKA dan PT MDP pada tanggal 30 September 2021.

12. OTHER RECEIVABLES - RELATED PARTIES

	31 Desember/ December 31, 2021	
	259.058.240.411	PT Muba Daya Pratama
	75.571.480.000	PT Sa Ary Indoraya
	2.225.311.049	Surya Mina Asinusa - KSO
	438.457.014	PT Asinusa Putra Sekawan
	5.000.000.000	Alm. Mr. Rahardjo
	342.293.488.474	Total
	(5.000.000.000)	Allowance for accounts receivable of Alm. Mr. Rahardjo
	(94.346.171.177)	Less allowance of expected credit loss
	242.947.317.297	Total

Receivables to PT Muba Daya Pratama (MDP) represent working capital receivables as at December 31, 2019 given to PT MDP since 2016, when PT MDP was still as a subsidiary of the Company, after deducting the payables of PT OEKA (subsidiary) to PT MDP based on the letter of agreement between PT OEKA and PT MDP dated September 30, 2021.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Piutang kepada PT Sa Ary Indoraya merupakan piutang atas pengambilalihan saham PT MDP pada tahun 2019 (Lihat Catatan 8).

Receivables from PT Sa Ary Indoraya represent receivables from the acquisition of shares of PT MDP in 2019 (See Note 8).

Piutang kepada Bapak Rahardjo Moecharar merupakan pemberian pinjaman kepada pemegang saham sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan PT SDP tanggal 28 Desember 2012.

Receivable to Mr. Rahardjo Moecharar was the granting of loans to shareholders in accordance to Minutes of Mutual Agreement with PT SDP dated December 28, 2012.

Pada tanggal 5 September 2014, Bapak Rahardjo Moecharar telah meninggal dunia dan tidak ditemukan kata sepakat dengan ahli waris atas pengembalian piutang tersebut atas hal tersebut manajemen berkesimpulan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagihkan dan melakukan penyisihan atas seluruh piutang tersebut.

On September 5, 2014, Mr. Rahardjo Moecharar has passed away and an agreement was not found with heir for the repayment of debt, for that management concludes that receivable cannot be collected and makes allowance of the entire receivables.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan piutang lain-lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible other receivables in the future.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

13. INVESTMENTS IN ASSOCIATES COMPANY AND JOINT VENTURES

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Investasi pada entitas asosiasi	44.745.001.039	40.433.671.321	<i>Investment in associates</i>
Investasi ventura bersama	52.387.870.287	50.078.892.647	<i>Investment in joint ventures</i>
Jumlah	97.132.871.326	90.512.563.968	Total

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investments in associates companies

PT Inpola Meka Energi

PT Inpola Meka Energi

Perusahaan memiliki saham sebesar 38,77% pada PT Inpola Meka Energi dengan nilai perolehan Rp.49.664.500.000, berdasarkan Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 61 tanggal 29 Maret 2019, sebagai berikut:

The Company owned 38.77% shares on the Deed of Sale and Purchase at PT Inpola Meka Energi or amounting to Rp.49,664,500,000, according to Notary Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 61 dated March 29, 2019, as follows:

Nama/ Name	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Awal Operasi Komersial/ Start Commercial Operation	Persentase Penyertaan/ Percentage of Participation
PT Inpola Meka Energi	Jakarta	Ketenagalistrikan/ Electricity	2008	38,77%

Mutasi investasi pada entitas asosiasi PT Inpola Meka Energi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates of PT Inpola Meka Energi are as follows:

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Saldo awal	40.433.671.321	44.173.403.833	Beginning balance
Penambahan	-	-	Addition
Penyesuaian bagian laba (rugi) tahun sebelumnya	52.690.814	-	Adjustment of the previous year's profit (loss)
Bagian laba (rugi) tahun berjalan	4.258.638.904	(3.739.732.512)	Share of current year's profit (loss)
Saldo akhir	44.745.001.039	40.433.671.321	Ending balance

b. Investasi pada ventura bersama

Surya Mina Bunkerindo Asinusa KSO

Pada tanggal 24 Juli 2018, PT Surya Mina Bunkerindo (SMB), anak usaha dari PT Mahkota Dinamika Niaga melakukan investasi kerja sama operasi dengan nama Surya Mina Asinusa KSO sebesar Rp.6.834.400.000. Atas investasi tersebut, SMB berhak atas sebesar 80% sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 4 Februari 2014 dibuat oleh Notaris Soeleman Odang, S.H., per 31 Desember 2022, nilai investasi kerja sama sebesar Rp.52.387.870.287, sebagai berikut:

b. Investments in joint venture

Surya Mina Bunkerindo Asinusa KSO

On July 24, 2018, the PT Surya Mina Bunkerindo (SMB), a subsidiary of PT Mahkota Dinamika Niaga established the joint venture investment named Surya Mina Asinusa KSO in amount of Rp.6,834,400,000. As the purpose of this investment, the SMB is entitled to the ownership of shares in amount of 80% in accordance with Deed No. 01 dated February 4, 2014 made by Notary Soeleman Odang, S.H., as at December 31, 2022, the investment value is amounted to Rp.52,387,870,287 as follows:

	Proyek/ Project	Persentase penyertaan/ Percentage of participation	Status/ Status
Surya Mina Bunkerindo - Asinusa Putra Sekawan	Tangki Timbun Nipa	80% : 20%	Berjalan/ In Progress
Mutasi investasi ventura bersama adalah sebagai berikut:			Changes in investments in joint ventures are as follows:
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai tercatat awal tahun	50.078.892.647	44.162.889.949	Carrying amount at the beginning year
Mutasi investasi - bersih	2.309.217.640	5.916.314.698	Investment movement - net
Bagian ventura bersama	(240.000)	(312.000)	Share in profit of joint ventures
Nilai tercatat akhir tahun	52.387.870.287	50.078.892.647	Carrying amount at end of year

14. INVESTASI JANGKA PANJANG

14. LONG-TERM INVESTMENTS

Nama/ Name	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Type of business	Persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki Grup/ Percentage of ownership interest and voting power held by the Group (%)		Jumlah tercatat/ Carrying amount	
			31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
PT Meulaboh Power Generation	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ Electricity producer	17%	17%	235.144.000.000	235.144.000.000
PT Muba Daya Pratama	Palembang	Penyediaan tenaga listrik/ Electricity producer	13%	13%	10.790.000.000	10.790.000.000
PT Pembangkitan Perkasa Daya (PPD)	Jakarta	Penyediaan tenaga listrik/ Electricity producer	5%	5%	494.935.000	494.935.000
Jumlah/Total					246.428.935.000	246.428.935.000

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Mutasi investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

Changes in long-term investments are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai tercatat awal tahun	246.428.935.000	246.428.935.000	Carrying amount at the beginning year
Penambahan investasi	-	-	Addition investment
Reklasifikasi	-	-	Reclassification
Nilai tercatat akhir tahun	246.428.935.000	246.428.935.000	Carrying amount at end of year

PT Meulaboh Power Generation

PT Meulaboh Power Generation

Perusahaan memiliki saham sebesar 17,16% pada PT Meulaboh Power Generation dengan nilai perolehan Rp.235.144.000.000, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Sirkuler "PT Meulaboh Power Generation. No. 20 tanggal 15 September 2021 dibuat oleh Notaris Leny, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bekasi.

The Company has 17.16% shares on PT Meulaboh Power Generation or amounting to Rp.235,144,000,000, based on Resolution of the Shareholders as a substitute General Meeting of Shareholders (GMS) with Circular "PT Meulaboh Power Generation. No. 20 dated September 15, 2021 by Notary Leny, S.H., M.Kn., in Bekasi Regency.

PT Muba Daya Pratama

PT Muba Daya Pratama

Perusahaan memiliki saham sebesar 13% pada PT Muba Daya Perkasa dengan nilai perolehan Rp.10.790.000.000, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta No. 2711 tanggal 17 Februari 2020 dari Notaris Ivan John Harris. S.H., M.Kn.

The Company has 13% shares on PT Muba Daya Perkasa or amounting to Rp.10,790,000,000, based on the Company's Shareholders' General Meeting as stated in Deed No. 2711 dated February 17, 2020 of Notary Ivan John Harris. S.H., M.Kn.

PT Pembangkitan Perkasa Daya

PT Pembangkitan Perkasa Daya

Pada tanggal 2 Mei 2019, Perusahaan menyetorkan dana kepada PT Pembangkitan Perkasa Daya sebesar Rp.494.935.000 dengan penyertaan setara dengan 5%. PT Pembangkitan Perkasa Daya didirikan sesuai dengan Akta No. 32 tanggal 24 Januari 2019 dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn., di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-005337.AH.01.01.TAHUN 2019.

On May 2, 2019, the Company paid the capital up to PT Pembangkitan Perkasa Daya amounted to Rp.494,935,000 that is equal to 5%. PT Pembangkitan Perkasa Daya was established according to the Deed No. 32 dated January 24, 2019 by Notary Selam Bastomi, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Deed of establishment had been approved by Minister of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-005337.AH.01.01.TAHUN 2019.

15. ASET TETAP

15. PROPERTY AND EQUIPMENT

	31 Desember/December 31, 2022			
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	
Nilai perolehan				
Pemilikan langsung				Acquisition cost
Peralatan kantor	386.440.446	-	-	386.440.446
Sub Jumlah	386.440.446	-	-	386.440.446
Jumlah	386.440.446	-	-	386.440.446
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Pemilikan langsung				Direct ownership
Peralatan kantor	288.846.828	81.560.113	-	370.406.941
Sub Jumlah	288.846.828	81.560.113	-	370.406.941
Jumlah	288.846.828	81.560.113	-	370.406.941
Nilai Buku	97.593.618			16.033.505
				Book Value

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai perolehan					Acquisition cost
Pemilikan langsung					Direct ownership
Peralatan kantor	386.440.446	-	-	386.440.446	Office equipment
Sub Jumlah	386.440.446	-	-	386.440.446	Sub Total
Jumlah	386.440.446	-	-	386.440.446	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung					Direct ownership
Peralatan kantor	197.253.393	91.593.435	-	288.846.828	Office equipment
Sub Jumlah	197.253.393	91.593.435	-	288.846.828	Sub Total
Jumlah	197.253.393	91.593.435	-	288.846.828	Total
Nilai Buku	189.187.053			97.593.618	Book Value

Perusahaan

Perusahaan memiliki aset tetap berupa peralatan kantor.

The Company

The Company has property and equipment that is office equipment.

16. ASET MINYAK DAN GAS BUMI

16. OIL AND GAS PROPERTIES

31 Desember/December 31, 2022						
	1 Januari/ January 1, 2022	Selisih kurs penjabaran/ Translation of foreign exchange differences	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Aset minyak dan gas bumi						Oil and gas properties
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	709.141.048.088	69.921.043.701	-	(1.780.991.550)	777.281.100.239	Wells and related equipment and facilities
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	104.913.815.334	10.749.406.815	32.445.754.003	-	148.108.976.152	Uncompleted wells, equipment and facilities
Bonus tanda tangan	14.269.005.000	1.461.995.000	-	-	15.731.000.000	Signature bonus
Pembongkaran aset dan restorasi area	-	-	7.467.424.791	-	7.467.424.791	Asset abandonment of site restoration
Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	210.808.287.492	-	-	(15.162.856.254)	195.645.431.238	Oil and gas concessions rights
Jumlah	1.039.132.155.914	82.132.445.516	39.913.178.794	(16.943.847.804)	1.144.233.932.420	Total
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi dan cadangan penurunan nilai						Accumulated depreciation, depletion and amortization and impairment reserves
	(95.567.389.214)	(11.571.981.094)	(18.351.274.375)	-	(125.490.644.683)	
Jumlah	(95.567.389.214)	(11.571.981.094)	(18.351.274.375)	-	(125.490.644.683)	Total
Nilai Buku	943.564.766.700				1.018.743.287.737	Book Value

31 Desember/December 31, 2021						
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisih kurs penjabaran/ Translation of foreign exchange differences	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Aset minyak dan gas bumi						Oil and gas properties
Sumur dan perlengkapan terkait dan fasilitasnya	703.078.617.984	7.843.421.654	-	(1.780.991.550)	709.141.048.088	Wells and related equipment and facilities
Sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	103.707.994.298	1.205.821.036	-	-	104.913.815.334	Uncompleted wells, equipment and facilities
Bonus tanda tangan	14.105.005.000	164.000.000	-	-	14.269.005.000	Signature bonus
Hak-hak konsesi aset minyak dan gas	225.971.143.746	-	-	(15.162.856.254)	210.808.287.492	Oil and gas concessions rights
Jumlah	1.046.862.761.028	9.213.242.690	-	(16.943.847.804)	1.039.132.155.914	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2021						
1 Januari/ January 1, 2021	Selisih kurs penjabaran/ Translation of foreign exchange differences	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021		
Akumulasi penyusutan, depleksi dan amortisasi dan cadangan penurunan nilai	(71.614.741.714)	(709.669.683)	(23.242.977.817)	-	(95.567.389.214)	Accumulated depreciation, depletion and amortization and impairment reserves
Jumlah	(71.614.741.714)	(709.669.683)	(23.242.977.817)	-	(95.567.389.214)	Total
Nilai Buku	975.248.019.314				943.564.766.700	Book Value

Merupakan aset minyak dan gas bumi PT OEKA (Entitas anak) yang terdiri dari:

- Aset minyak dan gas bumi yang mencerminkan seluruh biaya eksplorasi dan pengembangan untuk mendapatkan minyak dan gas sejak tanggal penandatanganan kontrak bagi hasil yaitu 16 Januari 2007. Seluruh biaya tersebut diajukan penggantian ke Pemerintah RI melalui mekanisme *cost recovery* setelah produksi minyak atau gas dimulai.
- Bonus tanda tangan adalah biaya yang dibayarkan Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak pengelolaan migas di Blok Karang Agung sesuai dengan ketentuan Kontrak Bagi Hasil pasal 8.1. Bonus tanda tangan diakui seluruhnya pada saat produksi minyak tercapai dalam satu tahun penuh.

Perusahaan menelaah secara berkala atas jumlah nilai tercatat aset minyak dan gas bumi dan memastikan bahwa jumlah nilai tercatatnya tidak melebihi nilai wajar, berdasarkan laporan penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Patuh, Ansori, Rahman dan Rekan pada tahun 2022 dengan No. 00095/2.174-00/BS/02/0458/1/II/2023, pada tanggal 9 Februari 2023 dan KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan pada tahun 2021.

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Merupakan aset PT OEKA dan PT MDN atas deposit sewa Gedung per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.596.254.029 dan Rp.555.543.204.

18. UTANG USAHA

Jangka pendek

	31 Desember/ December 31, 2022
Perusahaan	480.333.078
Entitas anak	39.407.686.393
Jumlah	39.888.019.471

Represent oil and gas properties of PT OEKA (Subsidiary) consisting of:

- Oil and gas properties reflect all costs of exploration and development to obtain oil and gas from the date of the production sharing contract signed on January 16, 2007. The entire cost proposed for reimbursement to the Government of Indonesia through a cost recovery mechanism after oil or gas production begins.
- Signature bonus is the fee paid by the Company to the Government of Indonesia to acquire concession of Karang Agung block oil and gas in accordance with the provisions of the Production Sharing Contract clause 8.1. Entire bonus expenses is recognised when the oil production is reached in a full year.

The Company regularly reviewed the carrying amount of oil and gas properties and ensured that the carrying amount not exceed the fair value, based on independent appraisal report registered in OJK, KJPP Patuh, Ansori, Rahman dan Rekan in 2022 with on No. 00095/2.174-00/BS/02/0458/1/II/2023, on February 9, 2023 and KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan in 2021.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Represent asset PT OEKA and PT MDN on the building rent deposit as at December 31, 2022 and 2021, amounting to Rp.596,254,029 and Rp.555.543.204, respectively.

18. TRADE PAYABLES

Short-term

	31 Desember/ December 31, 2021	
	1.278.905.704	The Company Subsidiary
	39.189.825.739	
Jumlah	40.468.731.443	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Perusahaan:			The Company:
CV Cipta Karya	169.330.612	375.000.000	CV Cipta Karya
Lain-lain (Dibawah Rp.300 Juta)	311.002.466	903.905.704	Others (Less than Rp.300 Million)
Sub Jumlah	480.333.078	1.278.905.704	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT SDP			PT SDP
PT Murah Rejeki Jaya Sempurna	12.691.135.749	13.691.135.749	PT Murah Rejeki Jaya Sempurna
PT Panca Sukses Makmur	2.543.957.899	2.543.957.899	PT Panca Sukses Makmur
PT Astria Trans	1.595.192.650	1.595.192.650	PT Astria Trans
PT Valindo Teknik Pratama	880.353.900	905.353.900	PT Valindo Teknik Pratama
PT MPC Asuransi	831.321.907	-	PT MPC Asuransi
PT Bina Dana Sejahtera	572.457.294	-	PT Bina Dana Sejahtera
PT Putra Hulu Lematang	308.333.170	308.333.170	PT Putra Hulu Lematang
Lain-lain (Dibawah Rp.300 Juta)	1.678.894.647	2.649.505.554	Others (Less than Rp.300 Million)
Sub Jumlah	21.101.647.216	21.693.478.922	Sub Total
PT OEKA			PT OEKA
PT Panca Utama Sejati	4.392.605.563	-	PT Panca Utama Sejati
PT Schlumberger Geophysics Nusantara	1.070.525.907	-	PT Schlumberger Geophysics Nusantara
PT Pertamina Gas	1.030.228.567	1.281.019.641	PT Pertamina Gas
PT Deva Samudra Energi	903.901.079	760.227.010	PT Deva Samudra Energi
PT Prima Sentra Usaha	668.628.284	606.487.848	PT Prima Sentra Usaha
PT Suma mandiri	507.696.563	223.640.646	PT Suma mandiri
Universitas Sriwijaya	458.837.447	696.073.313	Universitas Sriwijaya
PT Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia	504.099.820	457.250.197	PT Van Leeuwen Pipe and Tube Indonesia
PT Eonchemicals Putra	356.088.406	301.050.780	PT Eonchemicals Putra
PT Farrald Teknindo	351.340.940	177.254.720	PT Farrald Teknindo
PT Pertamina EP	-	2.918.664.620	PT Pertamina EP
PT Iskandar Wira Satya	-	704.299.906	PT Iskandar Wira Satya
PT Pajaga Lugas	-	556.062.000	PT Pajaga Lugas
Lain-lain (Dibawah Rp.300 Juta)	3.280.216.884	3.676.577.830	Others (Less than Rp.300 Million)
Sub Jumlah	13.524.169.460	12.358.608.511	Sub Total
PT MDN			PT MDN
Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd	1.038.415.000	1.038.415.000	Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd
PT Indospec Asia	532.000.000	600.000.000	PT Indospec Asia
BPPU ITS	600.000.000	600.000.000	BPPU ITS
PT Adisya Solusi	515.454.545	515.454.545	PT Adisya Solusi
Febri Gracio Stenry dan Partners Law Office	375.000.000	375.000.000	Febri Gracio Stenry and Partners Law Office
Lain-lain (Dibawah Rp.300 Juta)	1.721.000.172	2.008.868.761	Others (Less than Rp.300 Million)
Sub Jumlah	4.781.869.717	5.137.738.306	Sub Total
Jumlah	39.888.019.471	40.468.731.443	Total
Perusahaan			The Company
Utang kepada CV Cipta Karya merupakan utang atas biaya sewa kendaraan.			Payable to CV Cipta Karya represents payable for vehicle rental fees.
Selebihnya merupakan utang atas jasa manajemen dan operasional Perusahaan.			The remaining of for the Company's management and operations services.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Entitas Anak

PT SDP

Utang kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna, CV Panca Sukses Makmur, PT Putra Hulu Lematang, dan PT Astria Trans merupakan utang atas pengadaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung Tengah.

Utang kepada PT Valindo Teknik Pratama merupakan utang atas jasa perbaikan overhaul.

Utang kepada PT MPC Asuransi dan PT Bina Dana Sejahtera merupakan utang atas pembelian polis asuransi untuk pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lampung Tengah.

Selebihnya merupakan utang PT SDP (entitas anak) atas non pengadaan batubara.

PT OEKA

Utang kepada PT Panca Utama Sejati merupakan utang atas biaya pekerjaan sumur untuk akses jalan dan pelebaran jembatan.

Utang kepada PT Schlumberger Geophysics Nusantara merupakan utang atas pembelian pompa dan instalasi Electrical Submersible Pump (ESP).

Utang kepada PT Pertamina Gas merupakan utang atas biaya pengangkutan minyak bumi Perusahaan.

Utang kepada PT Deva Samudra Energi merupakan utang atas biaya pembelian BBM untuk industri.

Utang kepada PT Prima Sentra Usaha merupakan utang atas jasa pembersihan dan perawatan pipa.

Utang kepada PT Suma Mandiri merupakan utang atas jasa site preparation.

Utang kepada PT Van Leeuwen Pipe And Tube Indonesia merupakan utang atas pipa carbon steel size 3.

Utang kepada Universitas Sriwijaya merupakan utang atas pekerjaan jasa pemantauan lingkungan dan penyusutan laporan pelaksanaan UKL-UPL KKKS.

Utang kepada PT Eonchemicals Putra merupakan utang atas pembelian bahan kimia untuk pemisahan minyak dengan zat lain yang tercampur didalamnya.

Utang kepada PT Farrald Teknikndo merupakan utang atas Jasa Penelaahan Desain dalam Rangka Kebutuhan Pendukung Pekerjaan COI & PLO Instalasi dan Peralatan Penunjang Operasi Migas.

Subsidiaries

PT SDP

Payable to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna, CV Panca Sukses Makmur, PT Putra Hulu Lematang and PT Astria Trans represent payable of coal procurement for Coal Fired Power Plant (PLTU) Central Lampung.

Payable to PT Valindo Teknik Pratama represents payable for overhaul repair services.

Payable to PT MPC Insurance and PT Bina Dana Sejahtera represent payables for the purchase of an insurance policy for the Central Lampung Steam Power Plant (PLTU).

The remaining of payable represents PT SDP (subsidiary) payable on non coal procurement.

PT OEKA

Payable to PT Panca Utama Sejati represents payable for well work costs for road access and bridge widening.

Payable to PT Schlumberger Geophysics Nusantara represents payable for purchase of pumps and installation of Electrical Submersible Pump (ESP).

Payable to PT Pertamina Gas represent payables for the transportation costs of the Company's petroleum.

Payable to PT Deva Samudra Energi represent payables for the cost of purchasing fuel for the industry.

Payable to PT Prima Sentra Usaha represent payables for pipe cleaning and maintenance services.

Payables to PT Suma Mandiri represent payables for site preparation services.

Payable to PT Van Leeuwen Pipe And Tube Indonesia represent payables for size 3 carbon steel pipes.

Payable to Sriwijaya University represent payables for environmental monitoring service work and depreciation of KKKS UKL-UPL implementation reports.

Payable to PT Eonchemicals Putra represent payables for purchases of chemicals for separating oil from other substances mixed in it.

Payable to PT Farrald Teknikndo represents payable for Design Review Services in Context of Needs to Support Installation Works and Equipment to Support COI & PLO Oil and Gas Operations.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Selebihnya merupakan utang atas operasional OEKA.

The remaining of payables represent operations services OEKA.

Berdasarkan surat perjanjian perdamaian antara PT Odira Energi Karang Agung (dalam PKPU) dengan para kreditor PT Odira Energi Karang Agung (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan potongan utang usaha sebesar 25% bagi utang diatas Rp.1.000.000.000.

Based on the peace agreement letter between PT Odira Energy Karang Agung (in PKPU) and the creditors of PT Odira Energi Karang Agung (in PKPU) dated December 17, 2019, the Company received a 25% discount on accounts payable for debts above Rp.1,000,000,000.

PT MDN

PT MDN

Utang kepada Wood Mackenzie Asia Pasific Pte Ltd merupakan utang atas kajian *feasibility studies* pada proyek terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to Wood Mackenzie Asia Pacific Pte Ltd represents payable for the the feasibility studies on the storage tank terminal project on Pulau Nipa.

Utang kepada PT Indospec Asia merupakan utang atas pekerjaan pemeriksaan pipanisasi dan sertifikasi persetujuan layak operasi (PLO) pada proyek pembangunan terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to PT Indospec Asia represents payable for pipanisation inspection work and certification for operation approval (PLO) for the construction of a fuel storage tank terminal on Pulau Nipa.

Utang kepada BPPU ITS merupakan utang atas pekerjaan *Front End Engineering Design* (FEED) untuk dermaga pada proyek terminal tangki timbun di Pulau Nipa.

Payable to BPPU ITS represents payable for Front End Engineering Design (FEED) work for the fuel storage terminal project on Pulau Nipa.

Selebihnya merupakan utang PT MDN atas proyek terminal tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Pulau Nipa.

The remaining of payable PT MDN represents payable for the fuel storage tank terminal project on Pulau Nipa.

Jangka panjang

Long-term

Merupakan saldo utang usaha PT OEKA (entitas anak) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, berdasarkan Perjanjian Perdamaian antara para kreditor Perusahaan (dalam PKPU) dengan PT OEKA pada tanggal 17 Desember 2019 di Jakarta, yang telah di sahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) Nomor: 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2019.

Represents the balance of trade payables of PT OEKA (a subsidiary) with a maturity of more than one year, based on the Reconciliation Agreement between the Company's creditors (in PKPU) and PT OEKA on December 17, 2019 in Jakarta, which has been ratified based on the ratification of the settlement agreement (HOMOLOGASI) Number: 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dated December 18, 2019.

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
PT OEKA			PT OEKA
PT Darma 45 Abadi	26.156.658.379	23.725.731.943	PT Darma 45 Abadi
PT Menara Gading Putih	7.097.608.769	6.437.976.925	PT Menara Gading Putih
PT GL Nusantara	7.072.925.272	6.415.587.444	PT GL Nusantara
PT Hardinata Prabujaya	4.093.172.791	3.712.764.797	PT Hardinata Prabujaya
PT Viduo Vi Prabu	3.144.453.204	2.852.216.546	PT Viduo Vi Prabu
PT Laskar Prabu Sriwijaya	2.650.726.253	2.404.375.193	PT Laskar Prabu Sriwijaya
PT Vittolu Prabu Gasoil	1.273.868.940	2.175.683.174	PT Vittolu Prabu Gasoil
Ferry Rosnanda	1.789.425.496	1.623.121.312	Ferry Rosnanda
Lemigas	1.479.204.472	1.341.731.359	Lemigas
PT Handiyan Hottap Instrumen	1.334.170.920	1.210.176.819	PT Handiyan Hottap Instrumen
PT Putra Bajubang	996.107.341	903.531.920	PT Putra Bajubang
PT Prima Sentra Usaha	663.223.187	2.085.340.748	PT Prima Sentra Usaha
PT Rafinfa Industri Indonesia	884.563	802.353	PT Rafinfa Industri Indonesia
PT Multikarya Asia Pasifik Raya	-	619.265.625	PT Multikarya Asia Pasifik Raya
Jumlah	57.752.429.587	55.508.306.158	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Utang kepada PT Darma 45 Abadi merupakan utang atas biaya pekerjaan EPCI (*Engineering, Procurement, Construction and Installation*).

Payable to PT Darma 45 Abadi represent payable of the cost of the work of the EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation).

Utang kepada PT Menara Gading Putih merupakan utang atas pekerjaan pemasangan pipa fasilitas produksi proyek Sumur Minyak Ridho di Blok Karang Agung yang berlokasi di Palembang.

Payable to PT Menara Gading Putih of production pipe facilities installation on Ridho Oil Well in the Karang Agung Block that located in Palembang.

Selebihnya merupakan utang atas operasional OEKA.

The remaining of payables represent operations services OEKA.

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Gaji dan tunjangan	18.144.863.160	21.102.328.986	<i>Salaries and allowances</i>
Bunga pinjaman bank	21.248.891.549	14.107.348.103	<i>Bank loan interest</i>
Beban umum	31.512.814.612	12.037.632.871	<i>General expenses</i>
Pemakaian KWH Impor	4.589.131.383	3.930.499.795	<i>Use of Imported KWH</i>
Sewa	4.304.080.000	3.533.200.000	<i>Rent</i>
Jasa hukum BANI	1.224.000.000	-	<i>BANI legal services</i>
Asuransi	776.000.000	-	<i>Insurance</i>
Jumlah	81.799.780.704	54.711.009.755	Total

Biaya yang masih harus dibayar gaji dan tunjangan merupakan biaya gaji dan tunjangan masih harus dibayar PT OEKA (entitas anak) sebelum diakuisisi Perusahaan pada tahun 2018.

Accrued expenses for salaries and allowances are salaries and allowances costs accrued by PT OEKA (subsidiary) before being acquisition by the Company in 2018.

Bunga pinjaman bank merupakan bunga pinjaman bank Bukopin PT SDP (entitas anak) ditangguhkan sesuai persetujuan restrukturisasi pinjaman bank Bukopin (Lihat Catatan 20).

Bank loan interest represents interest on PT SDP (subsidiary) Bukopin's bank loans, deferred according to the Bukopin bank loan restructuring agreement (See Note 20).

Beban umum yang masih harus dibayar merupakan utang beban operasional Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2022 dan 2021.

The general expenses accrued represent the operating expenses of the Company and subsidiaries as at December 31, 2022 and 2021.

Biaya pemakaian kWh impor merupakan tagihan atas penggunaan listrik. Yang dipergunakan untuk memanaskan mesin-mesin dan sebagai lampu penerangan di PLTU Lampung Tengah.

Imported kWh usage fee is a bill for electricity usage. Which is used to heat the machines and as lighting in PLTU Lampung Tengah.

Jasa hukum BANI merupakan biaya yang masih harus dibayar atas jasa pendamping konsultasi permasalahan NPHR dan komponen listrik B dan D.

BANI legal services represents accrued expenses for advisory services on NPHR issues and electricity components B and D.

Biaya yang masih harus dibayar asuransi merupakan tagihan asuransi atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke PT Asuransi Ramayana, Tbk.

Accrued insurance costs represent the insurance bill for the Coal Fired Power Plant (PLTU) to PT Asuransi Ramayana, Tbk.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

20. UTANG BANK

Merupakan pinjaman bank bukopin yang diterima PT SDP (entitas anak) sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Jumlah pinjaman	92.611.869.961	92.813.240.483	<i>Total loan</i>
Dikurangi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	570.960.967	2.582.451.709	<i>Less - current portion</i>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	92.040.908.994	90.230.788.774	<i>Long-term loan - net of current maturities</i>

Sesuai surat persetujuan restrukturisasi fasilitas kredit No. 09908/DSAW/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Represents bank bukopin loans obtained from PT SDP (subsidiary) as follows:

Based on the approval letter for extension of credit facility No. 09908/DSAW/VIII/2022 dated August 5, 2022, with the conditions as follows:

Jenis fasilitas/ <i>Type of facilities</i>	Fasilitas maksimum/ <i>Maximum facility</i>	Tanggal perjanjian/ addendum <i>Agreement/ addendum date</i>		Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021
		2022	2021				
Jangka Panjang / Long Term							
Kredit Modal Kerja/ <i>Working Capital Credit</i>	19.858.135.776	5 Agustus/ <i>August 5,</i> 2022	30 Maret/ <i>March 30,</i> 2021	31 Maret 2030/ <i>March 31, 2030</i>	11,5%	19.797.075.868	19.865.697.553
Kredit Modal Kerja/ <i>Working Capital Credit</i>	19.912.143.913	5 Agustus/ <i>August 5,</i> 2022	30 Maret/ <i>March 30,</i> 2021	31 Maret 2030/ <i>March 31, 2030</i>	11,5%	19.863.961.102	19.921.631.347
Kredit Investasi <i>Civil Work/ Investment Credit Civil Work</i>	18.523.097.057	5 Agustus/ <i>August 5,</i> 2022	30 Maret/ <i>March 30,</i> 2021	31 Maret 2030/ <i>March 31, 2030</i>	11,5%	18.516.164.127	18.531.691.308
Kredit Investasi LC/ <i>Investment Credit LC</i>	27.770.324.691	5 Agustus/ <i>August 5,</i> 2022	30 Maret/ <i>March 30,</i> 2021	31 Maret 2030/ <i>March 31, 2030</i>	11,5%	27.734.769.935	27.783.839.469
Kredit Investasi IDC / <i>Investment Credit IDC</i>	6.707.159.285	5 Agustus/ <i>August 5,</i> 2022	30 Maret/ <i>March 30,</i> 2021	31 Maret 2030/ <i>March 31, 2030</i>	11,5%	6.699.898.929	6.710.380.806
Jumlah/ Total						92.611.869.961	92.813.240.483

Jaminan atas seluruh fasilitas yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 119.900 m² dan bangunan instalasi pembangkit listrik milik PT SDP yang terletak di Lampung Tengah, Lampung.
2. Sebidang tanah dan bangunan milik PT Lima Putra Contrindo seluas 4.680 m² yang terletak di Kawasan Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten.
3. Sebidang tanah dan bangunan milik PT Lima Putra Contrindo, luas 120 m², yang terletak di Kawasan Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten.
4. Sebidang tanah dan bangunan milik Maryati seluas 1.317 m² yang terletak di Jakarta Timur.
5. Sebidang tanah dan bangunan milik Maryati seluas 247 m² yang terletak di Jakarta Timur.
6. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 390 m² yang terletak di Jakarta Timur.

The collateral for the whole facilities obtained are as follow:

1. *A land area of 119,900 m² and building of power plant installation owned by PT SDP where located in Lampung Tengah, Lampung.*
2. *A building and land area of 4,680 m² owned by PT Lima Putra Contrindo located in Modern Cikande Industrial Estate Area, Serang, Banten.*
3. *A buildings and land area of 120 m² owned by PT Lima Putra Contrindo located in Modern Cikande Industrial Estate Area, Serang, Banten.*
4. *A building and land area of 1,317 m² owned by Maryati located in Jakarta Timur.*
5. *A building and land area of 247 m² owned by Maryati located in Jakarta Timur.*
6. *A building and land area of 390 m² owned by Rahardjo Moecharar located in Jakarta Timur.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|--|--|
| <p>7. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 506 m² yang terletak di Jakarta Timur.</p> <p>8. Sebidang tanah dan bangunan milik Rahardjo Moecharar seluas 894 m² yang terletak di Jakarta Timur.</p> <p>9. Tagihan milik PT SDP kepada PT PLN (Persero), Tbk atas transaksi sewa pembiayaan instalasi dan power plant (atau "atas penjualan energi listrik" sesuai <i>power purchase agreement</i> tanggal 21 Maret 2007 dan adendumnya) sebesar Rp.140.000.000.000.</p> <p>10. Persediaan batu bara milik PT SDP senilai Rp.20.000.000.000 berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00020677.AH.05.01.TH.2016 tanggal 15 Januari 2016.</p> | <p>7. A building and land area of 506 m² owned by Rahardjo Moecharar located in Jakarta Timur.</p> <p>8. A building and land area of 894 m² owned by Rahardjo Moecharar located in Jakarta Timur.</p> <p>9. PT SDP's receivable to PLN (Persero), Tbk on finance lease transaction of installation and power plant (or "on sale of electric energy" according to the power purchase agreement on March 21, 2007 and its addendums) amounted of Rp.140,000,000,000.</p> <p>10. Coal inventories owned by PT SDP amounting to Rp.20,000,000,000 based on Fiduciary Guarantee Certificate No. W10.00020677.AH.05.01.TH.2016 dated January 15, 2016.</p> |
|--|--|

PT SDP wajib menjaga rasio keuangan seperti *leverage* maksimum 2x, *interest service coverage ratio* minimum 1,5x, *current ratio* minimum 1,1x, *debt to EBITDA* maksimum 4x dan *debt coverage service ratio* minimum 1x.

PT SDP is required to maintain certain financial ratio such as maximum of leverage ratio is 2x, minimum interest service coverage ratio is 1.5x, minimum current coverage ratio is 1.1x, maximum debt to EBITDA of 4x and minimum debt coverage service ratio is 1x.

Pada tahun 2021, sesuai surat restrukturisasi fasilitas kredit No. 07639/DRTK/IV/2021 tanggal 29 April 2021, Perusahaan mendapatkan keringanan kewajiban kredit kepada PT Bank Bukopin Tbk berupa pembayaran suku bunga efektif sebesar 1,15% selama 12 bulan pertama dan terhadap sisa kewajiban 12 bulan tersebut ditangguhkan dan akan mulai dibayarkan sejak bulan ke 13 sejak restruktur sampai dengan jatuh tempo kredit lunas secara pro rata.

In 2021, based on letter of restructuring credit facility No. 07639/DRTK/IV/2021 dated April 29, 2021, the Company received a credit obligation relief to PT Bank Bukopin Tbk in an effective interest rate payment of 1.15% for the first 12 - months and against the remaining balance. The 12 - months obligation is deferred and will begin to be paid from the month 13th of the restructuring until the loan maturity is paid off on a pro rata basis.

Pada tahun 2022, Sesuai surat restrukturisasi fasilitas kredit No. 09908/DSAW/VIII tanggal 5 Agustus 2022, Perusahaan mendapatkan keringanan kewajiban kredit kepada PT Bank Bukopin Tbk berupa:

In 2022, in accordance with the restructuring letter of credit facility No. 09908/DSAW/VIII dated August 5, 2022, the Company obtained relief of credit obligations to PT Bank Bukopin Tbk in the form of:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran bunga sebesar 1,5% untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 6 dengan total pembayaran kewajiban sebesar Rp.150.000.000/bulan untuk seluruh fasilitas pinjaman sesuai dengan <i>repayment schedule</i>. - Pembayaran bunga sebesar 2% untuk bulan ke 7 sampai dengan bulan ke 12 dengan total pembayaran kewajiban sebesar Rp.200.000.000/ bulan untuk seluruh fasilitas pinjaman sesuai dengan <i>repayment schedule</i>. - Pembayaran bunga sebesar 2,5% untuk bulan ke 13 sampai dengan bulan ke 18 dengan total pembayaran kewajiban sebesar Rp.250.000.000/ bulan untuk seluruh pinjaman sesuai dengan <i>repayment schedule</i>. - Bulan ke 19 sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran suku bunga kembali normal sebesar 11,50% eff p.a. | <ul style="list-style-type: none"> - Payment of interest at 1.5% for month 1 to month 6 with a total payment obligation of Rp.150,000,000/ month for all loan facilities in accordance with the repayment schedule. - Payment of interest at 2% for the 7th month to the 12th month with a total payment obligation of Rp.200,000,000/ month for all loan facilities in accordance with the repayment schedule. - Interest payments of 2.5% for the 13th month to the 18th month with a total payment obligation of Rp.250,000,000/ month for the entire loan in accordance with the repayment schedule. - The 19th month until the maturity date the interest rate payment returns to normal at 11.50% eff p.a. |
|---|--|

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan entitas anak PT SDP menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti pada tahun 2022 untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, entitas anak PT OEKA menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti pada tahun 2022 untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 75 karyawan.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Tubagus Syafril dan Amiran Nangasan (Perusahaan dan entitas anak PT OEKA) dan aktuaris independen PT Sinco Aktuarindo Utama (Entitas anak PT SDP) per 31 Desember 2022 dan 2021. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Tingkat diskonto per tahun	7.23% - 7.42%	7.16% - 7.81%	<i>Discounted rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.00% - 8.00%	5.00% - 8.00%	<i>Salary increment rate per annum</i>
Tingkat pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	<i>Normal retirement rate</i>
Tingkat kematian	Indonesia Mortality	Indonesia Mortality	<i>Mortality rate</i>

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:

Post-employment benefit expense are recognized in consolidated comprehensive income as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Biaya jasa kini	823.958.740	893.524.872	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	347.396.353	426.285.231	<i>Interest cost</i>
Kurtailmen	1.213.073.057	(1.079.286.851)	<i>Curtailmen</i>
Biaya jasa masa lalu	(1.214.924.336)	(605.223.193)	<i>Past service cost</i>
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	<u>1.169.503.814</u>	<u>(364.699.941)</u>	<i>Components of defined benefit costs recognized in profit or loss</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	38.024	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in demography assumption</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	33.135.596	231.424.978	<i>Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	191.255.084	(464.765.116)	<i>Actuarial gains and losses arising from experience adjustments</i>
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	<u>224.390.680</u>	<u>(233.302.114)</u>	<i>Components of benefit costs recognized in other comprehensive income</i>
Jumlah	<u>1.393.894.494</u>	<u>(598.002.055)</u>	<i>Total</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dari biaya tahun berjalan sebesar Rp.1.321.711.119 dan Rp.1.319.810.103 masing-masing termasuk dalam beban umum dan administrasi tahun 2022 dan 2021.

From the expense of the year amounted to Rp.1,321,711,119 and Rp.1,319,810,103 were included in general and administration expenses in 2022 and 2021, respectively.

Liabilitas imbalan pasca kerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai kini kewajiban	6.448.795.802	5.384.182.200	Present value of funded obligation
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan defisit (surplus)	6.448.795.802	5.384.182.200	Funded status deficit (surplus)
Batasan atas aset yang diakui	-	-	Restrictions on recognized assets
Liabilitas bersih yang timbul dari kewajiban imbalan pasti	6.448.795.802	5.384.182.200	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption

Mutasi nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current year are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Kewajiban imbalan pasti - awal	5.384.182.200	7.269.444.452	Beginning defined benefit obligation
Biaya jasa kini	823.958.740	893.524.872	Current service cost
Biaya bunga	347.396.353	426.285.231	Interest cost
Biaya jasa masa lalu	(1.214.924.336)	(511.620.825)	Past service cost
Manfaat dibayarkan	(262.666.922)	(1.287.260.197)	Benefit payment
Kurtailmen	1.213.073.058	(1.172.889.219)	Curtailmen
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):			Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	29.753.021	38.024	Actuarial gains and losses arising from changes in demography assumption
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(63.231.396)	231.424.978	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumption
Keuntungan dan Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	191.255.084	(464.765.116)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Kewajiban imbalan pasti - akhir	6.448.795.802	5.384.182.200	Ending defined benefit obligation

Mutasi nilai kini dari liabilitas (aset) adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of liabilities (assets) are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai wajar aset program - awal	5.384.182.200	7.269.444.452	Fair value of plan assets - beginning
Biaya yang diakui via laba/rugi	1.169.503.814	(364.699.941)	Expense recognized through profit/loss
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	157.776.710	(233.302.114)	Total recognized on other comprehensive income
Pembayaran periode berjalan:			Payment during period:
- Iuran Perusahaan	-	-	Company contribution -
- Pembayaran manfaat	(262.666.922)	(1.287.260.197)	Benefit payment -
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	6.448.795.802	5.384.182.200	Fair Value of Plan Assets - Ending

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang menjadi sebesar Rp.6.125.000.069 (meningkat menjadi sebesar Rp.6.805.523.258).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan turun menjadi sebesar Rp.6.806.538.742 (naik menjadi sebesar Rp.6.118.123.660).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan. Metode tersebut sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on each changes of the assumptions that possibly occur at the end of the reporting period, while all other assumptions remain constant.

- If the discount rate increases (decreases) by 1%, defined benefit obligation will decrease to Rp.6,125,000,069 (increase to Rp.6,805,523,258).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation will be decrease to Rp.6,806,538,742 (increase to Rp.6,118,123,660).

The sensitivity analysis presented above may not be representing the actual change in the defined benefit considering that the change of occurrence assumptions are not isolated one to another because some of those assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the sensitivity analysis above, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period. The used method is same as applied in calculating defined benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

22. UTANG LAIN-LAIN

Jangka panjang

	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak berelasi	
PT PP (Persero) Tbk	1.358.798.921.471
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	13.609.000.000
PT Asinusa Putra Sekawan	2.141.848.155
Sub Jumlah	1.374.549.769.626
Pihak ketiga	
PT Odira Energy Persada	74.712.759.203
PT Persada Tanjung Api-Api	43.440.138.391
Sub Jumlah	118.152.897.594
Jumlah	1.492.702.667.220

22. OTHERS PAYABLE

Long-term

	31 Desember/ December 31, 2021	
		Related parties
	1.231.727.199.674	PT PP (Persero) Tbk
	13.766.787.229	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
	80.253.552	PT Asinusa Putra Sekawan
	1.245.574.240.455	Sub Total
		Third parties
	75.712.759.203	PT Odira Energy Persada
	43.440.138.391	PT Persada Tanjung Api-Api
	119.152.897.594	Sub Total
	1.364.727.138.049	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Utang lain-lain kepada PT PP (Persero) Tbk merupakan utang Perusahaan dan Entitas anak sebagai berikut:

Other payable to PT PP (Persero) Tbk represent the Company and Subsidiary's liability as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pinjaman modal kerja yang diterima Perusahaan, Pinjaman tersebut tanpa jaminan atas pinjaman tersebut dikenakan bunga 9-10% pertahunnya.	1.285.861.954.820	1.158.790.233.023	<i>Loan of working capital obtained by the Company, unsecured the loan bears an annual interest rate of 9-10%..</i>
Pinjaman modal kerja yang diterima PT SDP (Entitas Anak) untuk proyek instalasi dan pembangkit selama masa pengembangan sesuai dengan surat pernyataan utang dari Perusahaan atas hasil rekonsiliasi pinjaman PT PP (Persero) Tbk atas pinjaman tersebut dikenakan bunga 6% pertahunnya.	72.936.966.651	72.936.966.651	<i>Loan of working capital obtained by the PT SDP (Subsidiaries) for installation and power plant project during developing according to debt statement from the Company on the debt reconciliation from regarding loan from PT PP (Persero) Tbk the loan bears an annual interest rate of 6%.</i>
Jumlah	1.358.798.921.471	1.231.727.199.674	Total

Utang lain-lain kepada YKKPP merupakan utang Perusahaan dan Entitas anak sebagai berikut:

Other payable to YKKPP represent the Company and Subsidiary's liability as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pinjaman Perusahaan sehubungan dengan pengalihan saham PT SDP dari PT PP (Persero) Tbk, sesuai dengan perjanjian kesepakatan para pihak antara PT Mugi Makmur Sejahtera, PT SDP dan PT PPEN tanggal 28 Desember 2018 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, sebesar Rp.9.234.000.000, utang tersebut tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga dan utang lain-lain atas pengalihan utang PT SDP kepada PT PPEN sebesar Rp.4.375.000.000, pada tahun 2022 dengan jangka waktu sampai dengan dilakukan penyertaan modal YKKPP kepada PT PPEN.	13.609.000.000	9.391.787.229	<i>The Company's loan represent a payable regarding to the transfer shares of PT SDP from PT PP (Persero) Tbk, in accordance with mutual agreement between PT Mugi Makmur Sejahtera, PT SDP, and PT PPEN dated December 28, 2018 with the loan's term of payment is 2 (two) years until dated December 28, 2020 amounting to Rp.9,234,000,000, the loan is unsecured and free of interest and other payables for the transfer of PT SDP's debt to PT PPEN in the amount of Rp.4,375,000,000, as at 2022 with time period until the capital participation of YKKPP to PT PPEN is done.</i>
Pinjaman modal kerja yang diterima PT SDP (Entitas Anak) untuk proyek instalasi dan pembangkit selama masa pengembangan sesuai dengan amandemen II atas surat perjanjian pinjaman dana No. 002/ADD/SPPD/XI/2021 tanggal 18 November 2019 saldo utang lain-lain pihak berelasi fasilitas ini adalah pinjaman tanpa jaminan yang dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 18 November 2022. Pinjaman tersebut seluruhnya telah dialihkan kepada Perusahaan berdasarkan perjanjian pengalihan dan perjumpaan utang			<i>Loan of working capital obtained the PT SDP (Subsidiaries) for installation and power plant project during developing according with amendment II to the loan fund agreement letter No. 002/ADD/SPPD/XI/2021 dated November 18, 2021, the balance of other debts of related parties this facility is an unsecured loan which beared interest 10% p.a. and the loan period is up to November 18, 2022. The loan has been entirely transferred to the Company is based on PT SDP's debt transfer and settlement agreement to</i>

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
PT SDP kepada PT PPE No. 031/PPU/YKKPP-PPE-SDP/ XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.	-	4.375.000.000	PT PPE No. 031/PPU/YKKPP-PPE-SDP/XII/2022 dated December 27, 2022.
Jumlah	13.609.000.000	13.766.787.229	Total

Pinjaman kepada PT Odira Energy Persada

Merupakan pinjaman modal kerja yang diterima PT OEKA (entitas anak) dari PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada merupakan pemegang saham PT OEKA sebelum PT OEKA diambil alih oleh Perusahaan, pinjaman terdiri dari pencairan pinjaman dalam bentuk kas yang transaksinya dilakukan dalam mata uang dollar sebesar USD.7.144.271.

Loan from PT Odira Energy Persada

Represent a working capital loan obtained by PT OEKA (subsidiary) from PT Odira Energy Persada, PT Odira Energy Persada was the shareholder of PT OEKA before PT OEKA was taken over by the Company, loans consist of cash disbursement loan which the transaction are conducted in dollar amounted USD.7,144,271.

Pinjaman kepada PT Persada Tanjung Api-Api

Merupakan pinjaman modal kerja yang diterima PT OEKA (entitas anak) dari PT Persada Tanjung Api-Api sesuai perjanjian pinjam meminjam antara PT OEKA dengan PT Persada Tanjung Api-Api No. 012/PTAA-OEKA/2017 tanggal 13 Desember 2017. PT Persada Tanjung Api-Api merupakan pihak afiliasi PT OEKA sebelum PT OEKA diambil alih oleh Perusahaan.

Loan from PT Persada Tanjung Api-Api

Represent a working capital loan obtained by PT OEKA (subsidiary) from PT Persada Tanjung Api-Api based on loan agreement between PT OEKA with PT Persada Tanjung Api-Api No. 012/PTAA-OEKA/2017 dated December 13, 2017. PT Persada Tanjung Api-Api was the affiliated party of PT OEKA before PT OEKA was taken over by the Company.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA

Merupakan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area pada entitas anak PT OEKA, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

23. ASSET ABANDONMENT OBLIGATION AND SITE RESTORATION

Represents of asset abandonment obligation and site restoration in the subsidiary of PT OEKA, with details of the mutations as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	7.467.424.791	-	Addition during in the year
Revisi estimasi arus kas	-	-	Revision on estimated cash flows
Pembalikan dari efek diskonto	626.645.482	-	Unwinding effect of discounting
Saldo akhir	<u>8.094.070.273</u>	<u>-</u>	Ending balance
Rekening bersama dengan SKK Migas untuk dana Abandonment and Site Restoration ("ASR")	<u>(437.154.894)</u>	<u>-</u>	Joint account with SKK Oil and gas for funds Abandonment and Site Restoration ("ASR")
Saldo akhir, neto	<u>7.656.915.379</u>	<u>-</u>	Ending balance, net

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

24. MODAL SAHAM

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 24 Juni 2022 dari Hana Badrina, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.700.000.000.000 terbagi atas 700.000 saham dengan nominal saham Rp.1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.541.233.000.000 atau sebesar 541.233 lembar saham dengan susunan pemegang saham per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Total stock
PT PP (Persero) Tbk	536.302
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP)	4.931
Jumlah	541.233

24. CAPITAL STOCK

In 2022, based on the Decision Deed of Shareholders No. 12 dated June 24, 2022 from Hana Badrina, S.H., M.Kn., Notary in Karawang, the authorized capital of the Company amounted to Rp.700,000,000,000 divided into 700,000 shares with par value of each share of Rp.1,000,000. The capital has been issued and fully paid amounted to Rp.541,233,000,000 or amounted to 541,233 shares, with the composition of shareholders as at December 31, 2022 and 2021 is as follows:

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai nominal/ Par value
99,09%	536.302.000.000
0,91%	4.931.000.000
100%	541.233.000.000

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang disajikan sebagai tambahan modal disetor atas selisih antara harga pengalihan saham dengan nilai buku atas pengalihan saham PT MDP per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.13.425.138.372.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Business combination under common control presented as additional paid-in capital the difference between the transfer price of shares and book value of transfer shares of PT MDP as at December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp.13,425,138,372, respectively.

26. SALDO LABA

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya merupakan cadangan wajib pada entitas anak PT OEKA per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.117.261.246.915 dan Rp.46.500.234.923.

26. RETAINED EARNINGS

Appropriated retained earnings is a statutory reserve in the subsidiary of PT OEKA as at December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp.117,261,246,915 and Rp.46,500,234,923, respectively.

Pemegang saham PT OEKA menyepakati untuk mencadangkan dari saldo laba pada tahun 2021 sebesar Rp.101.087.159.988 sebagai tambahan cadangan modal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dengan Akta No. 10 tanggal 24 Juni 2022 dari Hana Badrina S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Karawang dan saldo laba pada tahun 2020 sebesar Rp.66.428.907.033 sebagai tambahan cadangan modal berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dengan Akta No. 01 tanggal 2 November 2021 dari Hana Badrina S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Karawang.

The shareholders of PT OEKA agreed to reserve Rp.101,087,159,988 from retained earnings in 2021 as additional capital reserves based on the Statement of Shareholders' Decision by Deed No. 10 dated June 24, 2022 from Hana Badrina S.H., M.Kn., notary in Karawang Regency and retained earnings in 2020 of Rp.66,428,907,033 as additional capital reserves based on the Statement of Shareholders' Decision with Deed No. 01 dated November 2, 2021 from Hana Badrina S.H., M.Kn., notary in Karawang Regency.

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

27. NON CONTROLLING INTEREST

Hak non pengendali atas aset bersih

Non controlling rights over net assets

31 Desember 2022/December 31, 2022				
Entitas anak/ Subsidiaries	Persentase kepemilikan/ Ownership	Nilai tercatat awal/ Initial carrying amount	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction)	Nilai nominal/ Par value
PT Sepoetih Daya Prima	25%	(28.039.658.124)	(12.616.677.812)	(40.656.335.936)
PT Odira Energy Karang Agung	30%	126.210.005.207	20.704.905.598	146.914.910.805
PT Mahkota Dinamika Niaga	27%	(6.359.187.238)	(544.812.550)	(6.903.999.788)
Jumlah		91.811.159.845	7.543.415.236	99.354.575.081
31 Desember 2021/December 31, 2021				
Entitas anak/ Subsidiaries	Persentase kepemilikan/ Ownership	Nilai tercatat awal/ Initial carrying amount	Penambahan (pengurangan)/ Addition (deduction)	Nilai nominal/ Par value
PT Sepoetih Daya Prima	25%	(17.216.522.540)	(10.823.135.584)	(28.039.658.124)
PT Odira Energy Karang Agung	30%	96.156.559.339	30.053.445.868	126.210.005.207
PT Mahkota Dinamika Niaga	27%	(5.045.435.379)	(1.313.751.859)	(6.359.187.238)
Jumlah		73.894.601.420	17.916.558.425	91.811.159.845

28. PENDAPATAN USAHA

28. REVENUES

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Pendapatan minyak dan gas bumi	147.605.695.014	138.699.027.599	Sale of oil and gas
Jumlah	147.605.695.014	138.699.027.599	Total

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG

29. COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Minyak	122.599.121.231	119.423.876.538	Oil
Penyusutan dan amortisasi	7.065.237.136	9.416.563.828	Depreciation and amortization
Sewa operasi	2.696.467.678	2.109.946.297	Operating lease
Batubara	1.548.457.294	184.993.252	Coal
Kuangan atas penjualan listrik	94.870.191	177.793.083	Finance of electricity sales
Jumlah	134.004.153.530	131.313.172.998	Total

30. BEBAN USAHA

30. OPERATING EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya pegawai	15.160.379.663	13.920.292.976	Employee expenses
Biaya umum	10.142.019.888	6.442.637.526	General expenses
Biaya pemasaran	655.232.275	440.177.217	Marketing expenses
Biaya penyusutan dan amortisasi	81.560.113	230.226.224	Depreciation and amortization expenses
Jumlah	26.039.191.939	21.033.333.943	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

31. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

31. OTHER INCOMES (EXPENSES)

	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Selisih kurs - bersih	55.106.327.355	10.790.689.298	Foreign exchange - net
Bagian laba (rugi) – entitas asosiasi dan ventura bersama	4.311.089.718	(3.740.044.512)	Gain or (loss) from associates and joint ventures
Pendapatan bunga	1.540.388.828	3.384.292.436	Interest income
Pemulihan cadangan penurunan nilai	7.049.582	409.356	Recovery allowance for impairment
Beban bunga	(126.106.548.957)	(122.491.801.333)	Interest expense
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(25.138.437.957)	(31.654.062.305)	Allowance for impairment loss expense
Penurunan nilai atas aset proyek konsesi	(32.799.000.000)	(24.541.000.000)	Provision for impairment losses for concession project
Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi	(16.943.847.804)	(16.943.847.804)	Provision for impairment losses on oil and gas properties
Beban administrasi bank	(16.746.579)	(23.184.532)	Bank administration expense
Lain-lain - bersih	(18.520.840.179)	83.321.103.643	Others - net
Jumlah	(158.560.565.993)	(101.897.445.753)	Total

**32. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

**32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION
WITH RELATED PARTIES**

Pihak berelasi	Sifat hubungan istimewa	Transaksi	Transaction	Nature of relationship	Related parties
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pemegang saham	Utang Antar Perusahaan	Intercompany Account Payable	Shareholder	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	Pemegang saham	Utang Antar Perusahaan Piutang setoran Modal Perusahaan	Intercompany Account Payable Receivables of paid up capital on the Company	Shareholder	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan
PT Inpolo Meka Energi	Entitas Asosiasi	Piutang Lain-lain	Others Receivable	Entity Associated	PT Inpolo Meka Energi
PT Muba Daya Pratama	Afiliasi	Piutang dan Utang antar Perusahaan	Intercompany Account Receivable and Payable	Affiliation	PT Muba Daya Pratama
PT Meulaboh Power Generation	Afiliasi	Piutang Lain-lain Tidak Lancar	Other Account Receivable - Non Current	Affiliation	PT Meulaboh Power Generation
Surya Mina Asinusa - KSO	Afiliasi	Investasi Jangka Panjang Piutang Lain-lain Tidak Lancar	Longterm Investment Other Account Receivable - Non Current	Affiliation	Surya Mina Asinusa – KSO
Direksi dan Komisaris	Personal Kunci	Remunerasi	Remuneration	Key Person	Commissioner and Director

Rincian akun dan saldo pihak berelasi lihat Catatan No. 08 - Piutang lain-lain, No. 12 - Piutang Lain-lain Tidak Lancar dan Catatan No. 22 - Utang Lain-lain Jangka Panjang.

The detail accounts and balances of the related parties, see Notes No. 08 - Others Receivable, No. 12 - Other Account Receivable - Non current and Notes No. 22 - Other Payable Long-term.

Biaya remunerasi komisaris dan direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.8.164.960.714 dan Rp.7.900.445.960.

The remuneration expenses of commissioners, and directors for years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp.8,164,960,714 and Rp.7,900,445,960, respectively.

(Lanjutan/Continued)

33. PERIKATAN

1. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT PLN (PERSERO)

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2 X 6) MW Lokasi - Lampung Tengah Antara PT SDP (Entitas Anak) dengan PT PLN (Persero)

PT SDP (entitas anak) telah mengadakan perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA) dengan PT PLN sesuai dengan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) (2 x 6) MW Lokasi Lampung Tengah antara PT PLN dengan PT SDP (entitas anak) pada tanggal 21 Maret 2007.

Atas perjanjian tersebut, Perusahaan masuk sebagai kategori Penghasil Listrik Independen (IPP).

Selanjutnya, berdasarkan:

1. Berita Acara Renegosiasi Usulan Perubahan Harga dan Kondisi Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW No. 04/BA/121/PANITIA IPP 5/2010 tanggal 9 Juni 2010.
2. Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-511/D5/02/2010 tanggal 1 Juli 2010 mengenai Hasil Verifikasi atas Hasil Evaluasi Penyesuaian Harga Beli Tenaga Listrik dari IPP PLTU Lampung Tengah pada PT PLN (Persero).
3. Persetujuan Komite Direktur PT PLN No. 025.K/KOMITE-IPP/DIR/2010 tanggal 9 Juli 2010 mengenai Persetujuan Penyesuaian Harga Beli Tenaga Listrik IPP PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW.
4. Akta Perdamaian antara PT PLN dengan PT SDP (entitas anak) terhadap Pembaharuan Penyesuaian Harga Jual Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah tanggal 10 Agustus 2010.
5. Surat dari Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral mengenai Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik PLTU Lampung Tengah Milik PT SDP kepada PT PLN No.6660/26/MEM.L/ 2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Perjanjian tersebut di atas telah diamandemen pada tanggal 28 Juni 2011, dengan perubahan-perubahan yang signifikan sebagai berikut:

- Menyesuaikan tarif komponen A.
- Masa berlaku perjanjian ini disepakati menjadi selama 25 tahun dimulai sejak *Commercial Operation Date (COD)*, kecuali diakhiri lebih awal oleh sesuatu yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

33. COMMITMENTS

1. AGREEMENT WITH PT PLN (PERSERO)

Power Purchase Agreement (PPA) Coal Fired Power Plant (PLTU) (2 X 6) MW Location – Central Lampung Between PT SDP (Subsidiary) and PT PLN (Persero)

PT SDP (subsidiary) entered into Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN in accordance with Purchase Agreement of Power Electricity (PPA) Coal Fired Power Plant (PLTU) at Central Lampung (2 x 6) MW capacity, between PT PLN and PT SDP (subsidiary) dated March 21, 2007.

According to the agreement, the Company is listed as an Independent Power Producer category (IPP).

Whereas based on:

1. Official report - Renegotiation Proposal of Price Adjustment and Condition of PPA PLTU Central Lampung 2 x 6 MW No. 04/BA/121/PANITIA IPP 5/2010 dated June 9, 2010.
2. Letter from State Auditor of Finance and Development (BPKP) No. S-511/D5/02/2010 dated July 1, 2010 regarding Verification Result of Price Adjustment Evaluation Proceed for IPP PLTU Central Lampung at PT PLN (Persero).
3. PT PLN Committee Directors Approval No. 025.K/KOMITE-IPP/DIR/2010 dated July 9, 2010 regarding Price Adjustment Approval for IPP PLTU Central Lampung 2 x 6 MW.
4. Reconciliation Deed of Price Adjustment and Renewal for PLTU Central Lampung between PT PLN with PT SDP (subsidiary) dated August 10, 2010.
5. Letter of Energy and Mineral Resources Minister regarding Approval of PT SDP Power Selling Price PLTU Central Lampung to PT PLN No. 6660/26/MEM.L/2010 dated October 19, 2010.

The agreement mentioned above was amended on June 28, 2011, with the significant clauses' changes as follow:

- To adjust the tariff of component A.
- The validity period of this agreement agreed to be for 25 years starting from *Commercial Operation Date (COD)*, except if terminated earlier in accordance with condition in the agreement.

(Lanjutan/Continued)

- Perusahaan harus mencapai target pengoperasian untuk unit 1 dalam 30 bulan dan unit 2 pada 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan amandemen.
- Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan pelaksanaan terkait seluruh kebutuhan termasuk didalamnya penyimpanan, pasokan yang cukup dan dapat diandalkan untuk proyek selama masa penggunaan batubara. Sebelumnya Perusahaan harus mengajukan kepada PT PLN terkait rencana suplai dan semua persyaratan dalam kontrak untuk direviu dan mendapat persetujuan dari PT PLN.

2. KONTRAK BAGI HASIL DENGAN BADAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

PT OEKA (entitas anak) telah melakukan kesepakatan bagi hasil dengan SKK Migas pada tahun 2007 dengan uraian umum kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan baru minyak dan gas bumi yang berlaku tersebut adalah sebagai berikut:

Kontrak Bagi Hasil (PSC) - Indonesia

PSC diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon komersial di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas bumi.

Tanggung jawab dari kontraktor dalam PSC umumnya termasuk menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diizinkan untuk melakukan lifting atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya.

Bagi hasil dalam bentuk *First Tranche Petroleum* (FTP) sebesar 10% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing.

Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk *cost recovery* bagi kontraktor yang dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh

- *The Company must reach the operating target for unit 1 in 30 months and unit 2 at 36 months from the date of signing the amendments.*
- *The Company shall be responsible for the preparation and planning implementation included storage, sufficient supply and reliable for project during the agreement term. Previously the Company shall submit to PT PLN its coal supply plan and all material term of coal supply contract shall be submitted to PT PLN for further review and approval.*

2. PRODUCTION SHARING CONTRACT WITH BADAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

PT OEKA (a subsidiary) sign into a production sharing contract with SKK Migas in 2007 with a general overview of the agreement and provisions in the applicable new oil and gas regulations explained as follows:

Production Sharing Contracts (PSC) - Indonesia

A PSC is awarded to contractors to explore hydrocarbon potential and to establish commercial hydrocarbon reserves in a specified area prior to commercial production. The contractor is generally required to relinquish specified percentages of the contract area on specified dates unless such designated areas correspond to the surface area of any field in which oil and gas has been discovered.

The responsibilities of a contractor under a PSC generally include financing all activities and preparing and executing the work program and budget. In return, the contractor may freely lift and dispose of its share of crude oil and gas production.

A sharing in the form of First Tranche Petroleum (FTP) of 10% out of total production before deduction of cost recovery is available to the Government and the contractor in line with their entitlement shares.

The balance of production after FTP is available for cost recovery for the contractor which is calculated in reference to the prevailing Indonesian crude price and actual gas prices. After the contractor has recovered all allowable costs, the Government is entitled to a specified share of the remaining natural gas and crude oil

(Lanjutan/Continued)

pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut ditandatangani.

PSC di Indonesia wajib memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

3. PERJANJIAN KERJA SAMA SUPPLY CHAIN FINANCING ACCOUNT RECEIVABLE (SCF AR) PARTNERSHIP KEPADA SUPPLIER PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Pada tanggal 24 Oktober 2022 PT OEKA (entitas anak) menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pemberian fasilitas *Supply Chain Financial Account Receivable (SCF AR) Partnership* kepada *Supplier* PT OEKA (Entitas anak), yang merupakan fasilitas pembayaran *post financing* yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada masing-masing *Supplier* yang direkomendasi atas pengalihan tagihan yang timbul sehubungan dengan adanya penjualan produk dan jasa vendor kepada Perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran atas tagihan atas piutang kepada PT OEKA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Fasilitas : Fasilitas Scf Ar Partnership
 Jenis fasilitas : SCF LINE
 Bentuk fasilitas : Plafon (non-cash loan)
 Mata uang : IDR
 Tenor SCF AR : Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pencairan Fasilitas SCR AR Partnership dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo invoice.
 Plafon kredit penerima : Maksimum 100% (seratus persen) dari portofolio piutang usaha.
 Media pencairan : CBM atau manual melalui unit kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Jangka waktu fasilitas : 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.

production and the contractor is entitled to the balance as its equity (profit) share.

The contractor is obligated to pay Indonesian corporate taxes on its specified profit share, generally, at the Indonesian corporate tax rate in effect at the time the PSC is executed.

PSC in Indonesia are subject to a Domestic Market Obligation (DMO) under which the contractor is required to supply the domestic market with the lesser of 25% of (i) the contractor's pre-tax share of total crude oil production and (ii) the contractor's profit share for oil.

3. AGREEMENT OF PARTNERSHIP SUPPLY CHAIN FINANCING ACCOUNT RECEIVABLE (SCF AR) PARTNERSHIP TO PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG SUPPLIERS BY PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

On October 24, 2022 PT OEKA (a subsidiary) arranged a cooperation agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, providing *Supply Chain Financial Account Receivable (SCF AR) Partnership* facilities to *Supplier* PT OEKA (a subsidiary), which is a post financing payment facility provided by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to each recommended supplier for collection of bills arising from the sale of vendor products and services to the Company which are used only for payment of bills of receivables to PT OEKA with the following details:

Facility name : Scf Ar Partnership Facility
 Facility type : SCF LINE
 Facility form : Plafon (non-cash loan)
 Currency : IDR
 SCF AR tenor : A maximum of 180 (one hundred and eighty) calendar days from the disbursement of the SCF AR Partnership facility and does not exceed the invoice due date.
 Beneficiary credit limit : Maximum 100% (one hundred percent) of the trade receivables portfolio
 Disbursement media : CBM or manual through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk work units.
 Facility term : 1 (one) year and can be extended.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

<p>Rate SCF : 8% p.a bersifat <i>reviewable</i> sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan kepada <i>Fasilitas SCF A/R Partnership</i> di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis di luar perjanjian kerjasama ini. Apabila Penerima <i>SCF AR Partnership</i> melakukan pembayaran dipercepat terhadap <i>Invoice</i> yang telah dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka atas <i>Rate SCF</i> yang telah diterima PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut tidak dapat dikembalikan.</p> <p>Perhitungan hari Rate SCF : 1 Tahun = 360 Hari.</p> <p>Pembayaran Rate SCF : Dilakukan dengan cara pemotongan dana di Rekening Giro Operasional BRI PT OEKA dari nilai yang tertera dalam <i>Confirmation Letter</i>.</p> <p>Provisi : 0,5% dari plafond penerima fasilitas <i>SCF A/R Partnership</i> dan dibayarkan pada saat penandatanganan akad kredit.</p> <p>Denda/penalty : Sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan ditanggung oleh PT OEKA.</p> <p>Agunan : Tagihan pembayaran pengadaan barang atau jasa yang dibuktikan dengan <i>confirmation letter</i> yang telah di konfirmasi oleh Perusahaan melalui <i>system CBM</i> atau melalui <i>TI Plus</i>.</p> <p>Pelunasan : Pada tanggal jatuh tempo <i>SCF A/R</i> yaitu maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak pencairan fasilitas <i>SCF AR Partnership</i> oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tersebut PT OEKA belum melakukan pembayaran <i>invoice</i> ke rekening <i>escrow account debtor</i>, maka berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 perjanjian ini.</p>	<p>SCF Rate : 8% p.a is <i>reviewable</i> in accordance with the interest rate set for the <i>SCF AR Partnership Facility</i> on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. It is sufficient to notify changes in interest rates in writing outside of this cooperation agreement. If the <i>SCF AR Partnership Recipient</i> makes an accelerated payment of the <i>Invoice</i> that has been financed by the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, then the <i>SCF Rate</i> that has been received by the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cannot be returned.</p> <p>Calculation of SCF Rate days : 1 Year = 360 Days.</p> <p>Payment of SCF Rate : Made by deducting funds in the PT OEKA's BRI Operational Current Account from the value stated in the <i>Confirmation Letter</i>.</p> <p>Provision : 0.5% of the ceiling for recipients of the <i>SCF A/R Partnership</i> facility and is paid at the time of signing the credit agreement.</p> <p>Fines/penalties : In accordance with the provisions applicable to the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and borne by PT OEKA.</p> <p>Collateral : Bill for payment for the procurement of goods or services as evidenced by a <i>confirmation letter</i> which has been confirmed by the Company through the <i>CBM</i> system or through <i>TI Plus</i>.</p> <p>Repayment : On the maturity date of <i>SCF A/R</i>, which is a maximum of 180 (one hundred and eighty) calendar days commencing from the disbursement of the <i>scf ar partnership</i> facility by the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. If within a maximum period of 180 (one hundred and eighty) calendar days the PT OEKA has not made an <i>invoice</i> payment to the debtor's account <i>escrow account</i>, then the provisions as stated in article 6 of this agreement shall apply.</p>
--	--

(Lanjutan/Continued)

Sumber : Pembayaran *invoice* dari
pembayaran Perusahaan
Tujuan : Untuk membiayai *invoice*
sesuai kontrak kerja.

Payment : Invoice Payment from
source Company
Purpose : To finance the invoice
according to the employment
contract.

**4. PERJANJIAN PEMBANGUNAN STORAGE
TANK TERMINAL BESERTA FASILITAS
PENDUKUNG DI PULAU NIPA PHASE - 1
ANTARA PT SURYA MINA ASINUSA KSO
(ENTITAS ANAK MDN) DENGAN PT PP
(PERSERO) TBK**

Berdasarkan surat perjanjian No. 001/PK/NIPA/ P-2017 tanggal 23 November 2017 antara Surya Mina Asinusa KSO dengan PT PP (Persero) Tbk, Divisi EPC, dilakukan PERJANJIAN PEMBANGUNAN STORAGE TANK TERMINAL BESERTA FASILITAS PENDUKUNG DI PULAU NIPA PHASE - 1 Terkait pembangunan Nipa *Storage Tank Terminal* berkapasitas 500.000 CBM dan fasilitas pendukung di Pulau Nipa. Nilai kontrak proyek tersebut sebesar USD.196.189.969,75 atau sejumlah Rp.2.656.019.810.475. Nilai kontrak tersebut belum termasuk PPN 10%. Harga kontrak adalah *Lump Sum Fixed*. Kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak dalam bentuk *surety bond*.

Saat ini proyek pembangunan *storage tank terminal* beserta fasilitas pendukung di Pulau Nipa phase - 1 dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

**5. PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA DAN SURYA MINA
ASINUSA KSO (ENTITAS ANAK MDN).**

Berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 21 April 2014 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian Pertahanan Di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah disepakati oleh Tuan Purnomo Yusgiantoro mewakili Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Wing Indrasmore Direktur PT Surya Mina Bunkerindo dan sah mewakili untuk dan atas nama Surya Mina Asinusa Kerjasama Operasi (KSO) yang beranggotakan PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan. Dimana Akta tersebut telah diamandemen terakhir oleh Akta Adendum perjanjian Notaris yang sama No. 14 tanggal 19 April 2018 dibuat di hadapan Notaris Pratiwi Handayani, S.H.,

**4. AGREEMENT OF TANK TERMINAL
STORAGE DEVELOPMENT AND
SUPPORTING FACILITIES IN NIPA ISLAND
PHASE - 1 PT SURYA MINA ASINUSA KSO
(SUBSIDIARY MDN) WITH PT PP (PERSERO)
TBK**

Based on the agreement letter No. 001/PK/NIPA/ P-2017 dated November 23, 2017 between Surya Mina Asinusa KSO and PT PP (Persero) Tbk, EPC Division, the AGREEMENT OF TANK TERMINAL STORAGE DEVELOPMENT AND SUPPORTING FACILITIES IN NIPA ISLAND PHASE - 1 Related to the construction of the Nipa Storage Tank Terminal with a capacity of 500,000 CBM and supporting facilities on Pulau Nipa. The contract value of the project is USD.196,189,969.75 or a total of Rp.2,656,019,810,475. The contract value does not include 10% VAT. The contract price is Lump Sum Fixed. The contractor is obliged to submit a bank guarantee worths of 5% of the contract value in the form of a surety bond.

Currently agreement of tank terminal storage development and supporting facilities in Nipa Island phase -1 terminated indefinitely.

**5. JOINT OPERATION AGREEMENT (JO)
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND SURYA
MINA ASINUSA JO (SUBSIDIARY MDN).**

Based on Deed No. 13 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 21, 2014 concerning the Utilization of Some Land-Owned Property in the Ministry of Defense on Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, which was agreed by Mr. Purnomo Yusgiantoro representing the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as First Party and Mr. Wing Indrasmore Director of PT Surya Mina Bunkerindo and legally represent for and on behalf of Surya Mina Asinusa Joint Operations (JO) consisting of PT Surya Mina Bunkerindo and PT Asinusa Putra Sekawan. As lastly amended by the Deed of Addendum of cooperation agreement No. 14 dated April 19, 2018 made before the Notary Pratiwi Handayani, S.H.,

(Lanjutan/Continued)

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan zona pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa sebagai salah satu pulau kecil terluar yang merupakan kawasan strategis nasional tertentu dan memiliki titik dasar (*base point*) pengukuran garis batas wilayah Negara.

Objek Kerjasama Pemanfaatan (Objek KSP) adalah Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan berupa sebidang tanah seluas 10.000 m², terletak di Pulau Nipa. Objek tersebut dihitung sebagai nilai investasi Pihak Kesatu sebesar Rp.72.652.743.363 berdasarkan nilai buku/nilai reklamasi.

Penerimaan langsung Negara yang wajib disetorkan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu KSP Pulau Nipa, terdiri dari:

- a. Kontribusi tetap sebesar 0,5% dari nilai investasi Pemerintah (sebesar Rp.363.263.716,82) dengan asumsi kenaikan nilai investasi sebesar 7,5% (sebesar Rp.37.561.251.276) selama jangka waktu KSP Pulau Nipa ini.
- b. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) KSP Pulau Nipa adalah sebesar 6,23% dari net cash flow proyek kerja sama dengan nilai minimal sebesar Rp.300.047.443.500 selama jangka waktu KSP Pulau Nipa.
- c. Nilai hibah awal berupa bangunan kantor tertutup, speedboat dan furniture/ peralatan kantor adalah sebesar Rp.8.340.000.000, yang nantinya akan ditetapkan status penggunaannya sebagai barang milik Negara pada Kementerian Pertahanan.

Dari nilai hibah tersebut telah dikeluarkan sebesar 5% (Rp.417.000.000) sebagai jaminan dengan masa berlaku sekurangkurangnya 36 bulan sejak dikeluarkan.

- d. Nilai sisa aset barang milik Negara dari KSP Pulau Nipa berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah minimal sebesar Rp.576.024.033.880.

Total penerimaan langsung negara minimal selama jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah sebesar Rp.921.972.728.656.

Dalam perjanjian terdapat beberapa sanksi yaitu:

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini belum memulai pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini.

This agreement's purpose to develop an economy-based defense zone in Pulau Nipa as one of the outermost small islands which is a particular national strategic area and has a base point for measuring the country's territorial boundaries.

The Object of Utilization Cooperation (KSP Object) is a State-Owned Property of the Ministry of Defense in the form of a plot of land measuring 10,000 m², located on Pulau Nipa. The object is calculated as the investment value of the First Party in the amount of Rp.72,652,743,363 based on the book value/ reclamation value.

Direct state revenue that must be deposited by the Second Party during the term of the Pulau Nipa KSP, consist of:

- a. *Fixed contribution of 0.5% of the value of Government investment (amounting to Rp.363,263,716.82) assuming an increase in the investment value of 7.5% (amounting to Rp.37,561,251,276) during the term of the Pulau Nipa KSP.*
- b. *The value of profit sharing of KSP of Nipa Island is 6.23% of the net cash flow of the project work together with a minimum value of Rp.300,047,443,500 during the term of the KSP of Pulau Nipa.*
- c. *The initial grant value in the form of closed office building, speedboat and office furniture/ equipment is Rp.8,340,000,000, whose status will be determined later as State property in the Ministry of Defense.*

Of the grant value has been issued at 5% (Rp.417,000,000) as collateral with a validity period of at least 36 months from the date of issuance.

- d. *The remaining value of State property assets from Pulau Nipa KSP in the form of oil tank buildings and supporting facilities that will be received at the end of the term of the Pulau Nipa KSP is a minimum of Rp.576,024,033,880.*

The total direct state revenue is at least during the KSP period of Pulau Nipa amounting to Rp.921,972,728,656.

In the agreement there are several sanctions, as follows:

- a. *If within a period of 1 year after the signing of this agreement the construction of facilities and infrastructure for storing oil and its supporting facilities as referred to in article 5 has not begun, the First Party has the right to terminate this agreement.*

(Lanjutan/Continued)

- b. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran atas pembagian keuntungan dari waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) dan ayat (12), maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai pembagian keuntungan tahun berjalan.

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan kesepakatan para pihak dan prioritas diberikan kepada pihak kedua.

Berdasarkan Akta Adendum No. 14 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 19 April 2018 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Pertahanan di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat beberapa perubahan atas perjanjian tersebut sebagai berikut:

Perubahan pertama terdapat pada Tahap Pembangunan:

- a. Pihak Kedua harus melaksanakan kegiatan persiapan dan perencanaan teknis konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 12 bulan menjadi 57 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- b. Pihak Kedua harus melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 36 bulan menjadi 84 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- c. Pihak Kedua harus membangun dan mengadakan peralatan hibah awal dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lambat 36 bulan menjadi 72 bulan kalender terhitung sejak Perjanjian KSP Pulau Nipa ini ditandatangani untuk hibah awal berupa kantor terintegrasi *furniture* dan sarana pendukung perkantoran.

Perubahan kedua terdapat pada Penerimaan Langsung Negara tentang pembayaran keuntungan KSP Pulau Nipa yang sebelumnya paling cepat dimulai pada tahun ke-4 berubah menjadi pada tahun ke-8 sejak ditandatanganinya perjanjian KSP Pulau Nipa.

- b. *In the event that the Second Party fails in making payment for the distribution of profits from the time referred to in article 16 paragraph (6) and paragraph (12), the second party is subject to a fine of 1% per day from the value of profit sharing for the current year.*

The term of this Agreement is valid for 30 years after being signed by the parties, and can be extended for a period of 30 years based on the agreement of the parties and priority given to the second party.

Based on the Deed of Addendum No. 14 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 19, 2018 concerning the Utilization of Some of State-Owned Property in the form of land in the Ministry of Defense on Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. There are several changes to the agreement as follows:

The first change is in the Development Phase:

- a. *Second Party must carry out preparatory activities and construction technical planning within a previous period of a maximum of 12 months to 57 calendar months as of the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.*
- b. *Second Party must carry out construction activities within a previous period of a maximum of 36 months to 84 calendar months as of the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.*
- c. *Second Party must build and hold initial grant equipment within the previous period no later than 36 months to 72 calendar months as of the Pulau Nipa KSP Agreement signed for the initial grant in the form of integrated office furniture and office support facilities.*

The second amendment was found in the Direct State Revenue regarding KSP Pulau Nipa Profit Sharing where as the existing agreement started as soon as to the 4th year, which later changed to the 8th year since the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.

(Lanjutan/Continued)

**6. PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
SURYA MINA ASINUSA KSO (ENTITAS
ANAK MDN).**

Berdasarkan Akta No. 09 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 16 April 2014 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah disepakati oleh Tuan Sharif Cicip Sutardjo mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Tuan Wing Indrasgoro selaku Direktur PT Surya Mina Bunkerindo dan sah mewakili untuk dan atas nama Surya Mina Asinusa Kerjasama Operasi (KSO) sebagai yang beranggotakan PT Surya Mina Bunkerindo dan PT Asinusa Putra Sekawan sebagaimana amendemen terakhir oleh Akta No. 14 tanggal 19 April 2018.

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan zona pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa sebagai salah satu pulau kecil terluar yang merupakan kawasan strategis nasional tertentu dan memiliki titik dasar (base point) pengukuran garis batas wilayah Negara.

Objek Kerjasama Pemanfaatan (Objek KSP) adalah barang milik negara Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa sebidang tanah seluas 240.000 m², terletak di Pulau Nipa. Objek tersebut dihitung sebagai nilai investasi Pihak Pertama sebesar Rp.231.020.559.930 berdasarkan nilai buku/nilai reklamasi.

Penerimaan langsung Negara yang wajib disetorkan oleh Pihak Kedua selama jangka waktu KSP Pulau Nipa, terdiri dari:

- a. Dari nilai hibah tersebut, telah dikeluarkan sebesar 5% (Rp.260.000.000) sebagai jaminan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 36 bulan sejak dikeluarkan.
- b. Nilai sisa aset barang milik Negara dari KSP Pulau Nipa berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah minimal sebesar Rp.1.704.073.842.605.

Total penerimaan langsung negara minimal selama jangka waktu KSP Pulau Nipa adalah sebesar Rp.3.243.616.021.937.

Dalam perjanjian terdapat beberapa sanksi yaitu:

**6. JOINT OPERATION AGREEMENT (JO)
BETWEEN THE MINISTRY OF MARITIME
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND SURYA
MINA ASINUSA JO (SUBSIDIARY MDN).**

Based on Deed No. 09 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 16, 2014 concerning the Utilization of Some of State-Owned Property in the form of land in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, which was agreed upon by Mr. Sharif Cicip Sutardjo representing the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as First Party and Mr. Wing Indrasgoro Director of PT Surya Mina Bunkerindo and legally represented for and on behalf of Surya Mina Asinusa Joint Operations (JO) consisting of PT Surya Mina Bunkerindo and PT Asinusa Putra Sekawan as lastly amended by Deed of addendum No. 14 dated April 19, 2018.

This agreement aims to develop an economy-based defense zone in Pulau Nipa as one of the outermost small islands which is a particular national strategic area and has a base point for measuring the country's territorial boundaries.

The Utilization Cooperation Object (KSP Object) is a state-owned property of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in the form of a plot of land covering 240,000 m², located on Pulau Nipa. The object is calculated as the First Party investment value of Rp.231,020,559,930 based on book value/ reclamation value.

Direct state revenue that must be deposited by the Second Party during the term of the Pulau Nipa KSP, consisting of:

- a. *Of the grant value, it has been issued at 5% (Rp.260,000,000) as collateral with a validity period of at least 36 months from the date of issuance.*
- b. *The remaining value of State property assets from Pulau Nipa KSP in the form of oil tank buildings and supporting facilities that will be received at the end of the term of the Pulau Nipa KSP is a minimum of Rp.1,704,073,842,605.*

The total direct state revenue is at least during the KSP period of Pulau Nipa amounting to Rp.3,243,616,021,937.

In the agreement there are several sanctions, namely:

(Lanjutan/Continued)

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini belum memulai pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan minyak beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini.
- b. Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melakukan pembayaran atas pembagian keuntungan dari waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) dan ayat (12), maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai pembagian keuntungan tahun berjalan.

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan kesepakatan para pihak dan prioritas diberikan kepada pihak kedua.

Berdasarkan Akta Adendum No. 06 dari Notaris Pratiwi Handayani, S.H., tanggal 16 April 2018 tentang Pemanfaatan Sebagian Barang Milik Negara berupa tanah pada kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat beberapa perubahan atas perjanjian tersebut sebagai berikut:

Perubahan pertama terdapat pada Tahap Pembangunan:

- a. Pihak kedua harus melaksanakan kegiatan persiapan dan perencanaan teknis konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 12 bulan menjadi 57 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- b. Pihak kedua harus melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lama 36 bulan menjadi 84 bulan kalender terhitung sejak perjanjian KSP Pulau Nipa ditandatangani.
- c. Pihak kedua harus membangun dan mengadakan peralatan hibah awal dalam jangka waktu yang sebelumnya paling lambat 36 bulan menjadi 72 bulan kalender terhitung sejak Perjanjian KSP Pulau Nipa ini ditandatangani untuk hibah awal berupa kantor terintegrasi furniture dan sarana pendukung perkantoran.

Perubahan kedua terdapat pada Penerimaan Langsung Negara tentang pembayaran keuntungan (*Profit Sharing*) KSP Pulau Nipa yang sebelumnya paling cepat dimulai pada tahun ke-4 berubah menjadi pada tahun ke-8 sejak ditandatanganinya perjanjian KSP Pulau Nipa ini.

- a. *If within a period of 1 year after the signing of this agreement the construction of facilities and infrastructure for storing oil and its supporting facilities as referred to in article 5 has not begun, the First Party has the right to terminate this agreement.*
- b. *In the event that the Second Party fails in making payment for the distribution of profits from the time referred to in article 16 paragraph (6) and paragraph (12), the second party is subject to a fine of 1% per day from the value of profit sharing for the current year.*

The term of this Agreement is valid for 30 years after being signed by the parties and can be extended for a period of 30 years based on the agreement of the parties and priority given to the second party.

Based on the Deed of Addendum No. 06 of Notary Pratiwi Handayani, S.H., dated April 16, 2018 concerning the Utilization of Some of State-Owned Property in the form of land in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. There are several changes to the agreement as follows:

The first change is in the Development Phase:

- a. *Second party must carry out preparatory activities and construction technical planning within a previous period of a maximum of 12 months to 57 calendar months as of the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.*
- b. *Second party must carry out construction building activities within a previous period of a maximum of 36 months to 84 calendar months as of the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.*
- c. *Second party must build and hold initial grant equipment within the previous period no later than 36 months to 72 calendar months as of the Pulau Nipa KSP Agreement signed for the initial grant in the form of integrated office furniture and office support facilities.*

The second amendment was found at the State Direct Revenue regarding the (Profit Sharing) payment. The Pulau Nipa KSP where as the existing agreement started as soon as to the 4th year was changed to the 8th year since the signing of the Pulau Nipa KSP agreement.

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan untuk sementara mengurangi aktivitas konstruksi di Proyek Nipa karena sedang mengkaji ulang serta menjajaki prospek bisnis yang lebih baik. Aktivitas konstruksi akan segera mulai kembali bila kajian tersebut telah selesai.

The Company has temporarily slowing down construction activities at the Nipa Project because it is reviewing and exploring better business prospects. Construction activities will resume immediately when the study is completed.

34. KONTINJENSI

PT SDP (entitas anak)

1. Somasi atas kewajiban pelunasan utang kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna

Pada pelaksanaan kegiatan produksi listrik PT SDP melakukan Perjanjian jual beli batu bara kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna dimana sebelumnya CV Panca Sukses Makmur berdasarkan perjanjian jual beli batubara No. 001/PJBB/MRJS-SDP/II/2020 tanggal 11 Februari 2020. PT SDP memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Murah Rejeki Jaya Sempurna sebesar Rp.16.274.739.537 yang sampai saat ini belum diselesaikan.

PT SDP (Entitas anak) telah beberapa kali menerima somasi dari kuasa hukum PT Murah Rejeki Jaya Sempurna terakhir berdasarkan surat Somasi Terakhir No. 030/S.K/SP/IV/2022 tanggal 1 April 2022 menerangkan bahwa PT Murah Rejeki Jaya Sempurna menyampaikan somasi terakhir dan akan memberikan waktu selama 14 hari dari surat ini disampaikan agar PT SDP atau PT PP Energi untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Dan bahwa kami telah menggandeng salah satu pihak yang mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan klien kami dan telah berkordinasi dengan Kurator DR. Fedli Faisal, S.H., M.H., Untuk dapat menjadi Kurator dalam gugatan PKPU atau Pailit di Pengadilan Negri Jakarta Pusat dan kami sedang melengkapi dokumen lengkap untuk disampaikan dan dilaporkan dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN RI untuk penyelesaian masalah ini, jika dalam jangka waktu 14 hari persoalan ini tidak terselesaikan.

Sesuai dengan konfirmasi legal No. 002/EXT/LGL/PPE/II/2023 tanggal 3 Januari 2023, saat ini PT SDP telah melakukan penanganan dengan melakukan pencicilan pembayaran dan negosiasi penyelesaian atas somasi-somasi tersebut.

34. CONTINGENCIES

PT SDP (Subsidiary)

1. The Somation on the obligation to pay off debts to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna

In the implementation of electricity production activities, PT SDP entered into a coal sale and purchase agreement with PT Murah Rejeki Jaya Sempurna where previously CV Panca Sukses Makmur was based on a coal sale and purchase agreement No. 001/PJBB/MRJS-SDP/II/2020 dated February 11, 2020. PT SDP has a payment obligation to PT Murah Rejeki Jaya Sempurna amounted to, Rp.16,274,739,537 which not yet to be resolved until now.

PT SDP (Subsidiary) has received several somation from the last lawyer of PT Murah Rejeki Jaya Sempurna he last based on the Final Somation letter No. 030/S.K/SP/IV/2022 dated April 1 2022 explaining that PT Murah Rejeki Jaya Sempurna delivered the final somation and will give time for 14 days from the time this letter is submitted so that PT SDP or PT PP Energi can complete their obligations. And that we have partnered with a party who has almost the same problem as our client and has coordinated with Curator DR. Fedli Faisal, S.H., M.H., To be able to become a Curator in a PKPU or Bankruptcy lawsuit at the Central Jakarta District Court and we are currently completing complete documents to be submitted and reported and coordinating with the Ministry of BUMN RI to resolve this issue, if within 14 days this issue is not resolved.

According to legal confirmation No. 002/EXT/LGL/PPE/II/2023 dated January 3, 2023, currently PT SDP has handled it by making installment payments and negotiating negotiating the settlement of the somations.

(Lanjutan/Continued)

2. Somasi atas kewajiban pelunasan utang kepada PT Valindo Teknik Pratama

Perusahaan menerima somasi dari kuasa hukum PT Valindo berdasarkan surat somasi No. 109/Rd/Somasi/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 menerangkan bahwa dalam surat somasi tersebut, PT Valindo Teknik Pratama menyatakan bahwa telah berulang kali meminta PT Sepoetih Daya Prima untuk segera melakukan pembayaran akan tetapi PT Valindo Teknik Pratama tidak juga mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran menyeluruh atas kewajiban PT Sepoetih Daya Prima kepada PT Valindo Teknik Pratama.

Berdasarkan hal-hat tersebut, maka PT Valindo Teknik Pratama memberi Somasi/Peringatan kepada PT Sepoetih Daya Prima agar segera melaksanakan pembayaran sebesar Rp.816.693.400, apabila dengan alasan apapun, jmlah tunggakan tidak dibayarkan secara penuh atau diselesaikan paling lambat 14 hari terhitung sejak surat somasi terbit, maka PT Valindo Teknik Pratama akan menggunakan haknya untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme hukum pidana, hukum perdata atau melalui pengadilan niaga dan untuk setiap pengeluaran dan biaya yang timbul akibat permasalahan ini ditanggung oleh PT Sepoetih Daya Prima.

Sesuai dengan konfirmasi legal No. 002/EXT/LGL/PPE/I/2023 tanggal 3 Januari 2023, saat ini PT SDP telah melakukan penanganan dengan melakukan pencicilan pembayaran dan negosiasi penyelesaian atas somasi-somasi tersebut.

3. Klaim kerugian atas sengketa tarif listrik jual beli listrik PT SDP (entitas anak) dengan PT PLN (Persero).

Berdasarkan surat konfirmasi legal No. 002/PPE/LEG/SP/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, terdapat klaim kerugian PT SDP (Entitas anak) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp.79,4 milyar, atas kerugian yang timbul dari penggunaan NPHR sementara sebesar 4.400, klaim atas kerugian konsumsi batubara selama penetapan NPHR sementara oleh PT PLN (Persero), klaim atas denda AFPM akibat kerugian batubara masing-masing sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan klaim selisih tarif komponen B&D. Dengan rincian kronologi sebagai berikut:

2. The Somation on the obligation to pay off debts to PT Valindo Teknik Pratama

The Company received a somation from the lawyer of PT Valindo's based on the somation No. 109/Rd/Somasi/V/2021 dated May 24, 2021 explaining that in the somation, PT Valindo Teknik Pratama stated that it had repeatedly asked PT Sepoetih Daya Prima to immediately make payments but PT Valindo Teknik Pratama also did not get certainty of the complete payment settlement for the liability of PT Sepoetih Daya Prima to PT Valindo Teknik Pratama.

Based on these things, then PT Valindo Teknik Pratama gave a somation/warning to PT Sepoetih Daya Prima to immediately make a payment of Rp.816,693,400, if for any reason, the arrears are not paid in full or settled no later than 14 days from the issuance of the somation, PT Valindo Teknik Pratama will exercise its right to take the necessary legal steps to resolve this issue through criminal law mechanisms, civil law or through a commercial court and for any expenses and costs arising from this matter to be borne by PT Sepoetih Daya Prima.

According to legal confirmation No. 002/EXT/LGL/PPE/I/2023 dated January 3, 2023, currently PT SDP has handled it by making installment payments and negotiating negotiating the settlement of the somations.

3. Claims for losses on electricity tariff disputes for buying and selling electricity from PT SDP (a subsidiary) with PT PLN (Persero).

Based on the legal confirmation letter No. 002/PPE/LEG/SP/I/2022 dated January 27, 2022, there is a claim for losses from PT SDP (subsidiary) to PT PLN (Persero) amounting to Rp.79.4 billion, for losses arising from use of a temporary NPHR of 4,400, claims for loss of coal consumption during the determination of the temporary NPHR by PT PLN (Persero), claims for AFPM fines due to coal losses respectively from 2014 to the present, and claims for the difference in tariff for the B&D component. With the details of the chronology as follows:

(Lanjutan/Continued)

a. Kronologi penetapan tarif NPHR.

Pada tahun 2014 sesuai kesepakatan PT PLN (Persero) dan PT SDP pada tanggal 10 Juni 2013, bahwa penetapan NPHR PT SDP berdasarkan pengujian PT PLN Jaser (Pusertif) dimana hasil *Performance Test* PT PLN Jaser 18-19 Februari 2014 diperoleh NPHR sebesar 4,914 kCal/kWh, dan pada tanggal 26 Juni 2014 PT PLN (Persero) menolak hasil *Performance Test* dan meminta PT PLN Jaser melakukan test ulang, sekaligus menetapkan NPHR sementara sebesar 4.400 kCal/kWh, lalu PT SDP agar PT PLN (Persero) mau membayar tagihan listrik SDP, maka sejak COD Juni 2014 pembayaran tagihan listrik menggunakan NPHR sementara sebesar 4,400 kCal/kWh.

Pada tahun 2015 *Performance Test* ulang (PT-2) dilakukan pada tanggal 16-17 September 2015, diperoleh NPHR 4,405 kCal/kWh. Dimana laporan baru diberikan oleh PT PLN (Persero) pada November 2016 ke PT SDP.

Pada tahun 2016 hingga 2019 PT SDP berkali-kali melakukan rapat dengan PT PLN (Persero) namun tidak menemukan titik temu, hingga akhirnya PT SDP meminta agar dilakukan mediasi oleh Kementerian ESDM - Gatrik, akan tetapi pada tahun 2020 mediasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM - Gatrik tidak mencapai kesepakatan dikarenakan PT PLN (Persero) menolak membuka dan mereview bersama hasil PT-2 dengan Gatrik. PT PLN (Persero) mengirim surat bahwa NPHR definitif yang digunakan dalam kontrak adalah berdasarkan NPHR sementara dan direspon oleh PT SDP melalui surat PT PLN (Persero) bahwa PT SDP menolak NPHR sementara dijadikan NPHR definitif karena tidak berdasarkan perhitungan/kaidah teknis maupun bisnis, dimana PT SDP meminta PT-2 untuk direview bersama, namun sampai saat ini PT PLN (Persero) belum menanggapi surat tersebut.

Pada tahun 2021 berdasarkan berita acara kesepakatan untuk verifikasi perhitungan NPHR oleh LAPI ITB, tanggal 23 September 2021, PLN dan SDP sepakat untuk menunjuk LAPI ITB untuk melakukan reviu penetapan NPHR IPP PLTU Lampung Tengah, dan sepakat bahwa hasil kajian/rekomendasi dari LAPI ITB terkait NPHR pada PLTU Lampung Tengah tersebut akan diterima dan tunduk pada persetujuan korporatif masing-masing pihak.

a. Chronology of NPHR tariff setting.

In 2014 according to the agreement between PT PLN (Persero) and PT SDP on June 10, 2013, that the determination of PT SDP's NPHR was based on the PT PLN Jaser (Pusertif) test where the results of the PT PLN Jaser Performance Test February 18-19, 2014 obtained an NPHR of 4.914 kCal/kWh, and at dated June 26, 2014 the PT PLN (Persero) rejected the Performance Test results and asked PT PLN Jaser to do a retest, as well as set a temporary NPHR of 4,400 kCal/kWh, then PT SDP asked PT PLN (Persero) to pay PT SDP electricity bills, so since COD in June 2014 the payment of electricity bills uses a temporary NPHR of 4.400 kCal/kWh.

In 2015, another Performance Test (PT-2) was conducted on September 16-17, 2015, and obtained an NPHR of 4.405 kCal/kWh. Where a new report was given by PT PLN (Persero) in November 2016 to PT SDP.

In 2016 to 2019 PT SDP repeatedly held meetings with PT PLN (Persero) but did not find a common ground, until finally PT SDP asked for a mediation by the Ministry of Energy and Mineral Resources - Gatrik, but in 2020 the mediation conducted by the Ministry of Energy and Mineral Resources - Gatrik did not reached an agreement because PT PLN (Persero) refused to open and jointly review the results of PT-2 with Gatrik. PT PLN (Persero) sent a letter that the definitive NPHR used in the contract was based on the temporary NPHR and responded by PT SDP through a PT PLN (Persero) letter that PT SDP rejected the temporary NPHR as the definitive NPHR because it was not based on technical or business calculations/rules, where PT SDP asked PT-2 for review together, but until now PT PLN (Persero) has not responded to the letter.

In 2021 based on the minutes of the agreement to verify the NPHR calculation by LAPI ITB, on September 23, 2021, the PLN and SDP agreed to appoint LAPI ITB to review the determination of the NPHR IPP PLTU Central Lampung, and agreed that the results of the study/recommendations from LAPI ITB were related The NPHR at the Central Lampung PLTU will be accepted and subject to the corporate approval of each party.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Sampai tanggal pelaporan pengajuan penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Until reporting date, the submission for the tariff adjustment is still in process of completion.

b. Kronologi penyesuaian tarif B&D

b. Chronology of B&D tariff adjustments

Pada tahun 2015 PT SDP mengajukan permohonan penyesuaian tarif komponen B&D mengacu pada *Clause II point 1 PPA*, dan disetujui oleh PLN dan meminta lembaga independen untuk melakukan audit teknologi dan keuangan sesuai *Clause II point 1 PPA*, dan disetujui oleh PLN atas permintaan PT SDP dimana BPPT sebagai Lembaga Independent yang akan melakukan audit.

In 2015 PT SDP submitted an application for tariff adjustment for B&D components referring to Clause II point 1 PPA, and was approved by PLN and asked an independent institution to conduct technology and financial audits according to Clause II point 1 PPA, and was approved by PLN at the request of PT SDP where BPPT as an Independent Institution that will conduct an audit.

Pada tanggal 31 Oktober 2016 PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa penyesuaian tarif B&D yang bisa diterima sebesar Rp.213/kWh, namun tertunda karena adanya perubahan pejabat PT PLN (Persero) yang menangani, lalu pada tanggal 2 Oktober 2017, PT PLN (Persero) melalui pejabat yang baru melakukan review ulang dan menyampaikan bahwa penyesuaian tarif B&D yang bisa diterima sebesar Rp.161/kWh.

On October 31, 2016, PT PLN (Persero) stated that the acceptable B&D tariff adjustment was Rp.213/kWh, but it was delayed due to a change in the PT PLN (Persero) official in charge, then on October 2, 2017, PT PLN (Persero) through a new official reviewed and conveyed that the adjustment tariff B&D that can be received is Rp.161/kWh.

Pada tahun 2018 PT PLN (Persero) kembali melakukan review ulang dan menyampaikan bahwa tarif yang bisa diterima PT PLN (Persero) adalah Rp.120/kWh, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan direksi PT PP (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero) ditahun 2019 dan menyepakati agar masalah penyelesaian tarif dapat segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi (audit) BPKP.

In 2018 PT PLN (Persero) reviewed for the second time and told that the tariff PT PLN (Persero) could accept was Rp.120/kWh, which was followed up with a meeting of the directors of PT PP (Persero) Tbk and PT PLN (Persero) in 2019 and agreed that the problem of tariff resolution could be immediately proceed to the next stage, namely the evaluation (audit) of the BPKP.

Pada tahun 2020 telah dilakukan pembahasan awal dengan BPKP, namun belum bisa dilanjutkan karena PT PLN meminta agar BPKP mengaudit tarif B&D namun hasilnya tidak boleh melebihi yang diminta PT PLN (Persero) yakni 120/kwh, dan PT SDP menolak permintaan PT PLN (Persero) tersebut dan meminta agar kewenangan BPKP tidak dibatasi atas tarif. PT SDP menyampaikan bahwa apapun hasil evaluasi BPKP harus diikuti oleh PT PLN (Persero) dan PT SDP.

In 2020, an initial discussion was held with BPKP, but it could not be continued because PT PLN (Persero) asked BPKP to audit the B&D rates but the results could not exceed what PT PLN (Persero) requested, which is 120/kwh, and PT SDP rejected PT PLN's request and asked that BPKP's authority not be limited over tariff. PT SDP told that whatever the results of the BPKP evaluation must be followed by PT PLN (Persero) and PT SDP.

Pada tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan untuk verifikasi kesepakatan komponen listrik B dan D oleh BPKB IPP PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW tanggal 23 September 2021, PLN dan SDP sepakat bahwa usulan penyesuaian harga komponen B dan D yang sebelumnya sebesar Rp.49,14/kWh untuk komponen B

In 2021, based on the Minutes of Agreement to verify the agreement for electrical components B and D by BPKB IPP PLTU Central Lampung 2 x 6 MW on September 23, 2021, PLN and SDP agreed that the proposed price adjustment for components B and D was previously Rp.49.14/ kWh for component B becomes

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

menjadi Rp.102/kWh, dan usulan komponen D yang sebelumnya Rp.18,43/kWh menjadi Rp.18,43/kWh. Usulan tersebut sesuai pasal II ayat I PPA akan dilakukan peninjauan dan verifikasi oleh BPKP, untuk selanjutnya dijadikan dasar pengajuan permohonan penyesuaian harga kepada Menteri ESDM. Dan amandemen PPA terkait penyesuaian harga komponen listrik B dan D tersebut dilaksanakan setelah penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dari menteri ESDM.

Sampai tanggal pelaporan pengajuan penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses penyelesaian.

PT OEKA (Entitas anak)

Pada tahun 2019 PT OEKA melakukan perjanjian perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan para kreditor PT OEKA (dalam PKPU), sesuai dengan surat perjanjian perdamaian antara PT OEKA dengan para kreditor Perusahaan (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, dan Surat Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2019. Terhadap keputusan tersebut terdapat kreditor yang melakukan banding.

Berdasarkan surat korespondensi Legal PT OEKA No. 133/EXT/OEKA/D00/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, terdapat 2 Perkara hukum yang sedang dijalani oleh PT OEKA antara lain:

1. Perkara Perdata No. 564/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara PT Dharma Empat Lima Abadi, PT Menara Gading Putih, dan PT Ogan Lematang dengan PT OEKA, terkait perkara Perdata, pengajuan banding terhadap putusan sela dari pengadilan yang menetapkan PT OEKA tetap melaksanakan putusan PKPU dan perjanjian perdamaian, perkara perdata tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 sudah submit dalam Kontra Memori Banding dan dipersidangkan pada tanggal 8 Februari 2022, dalam Laporan Persidangan perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) No. 28/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2021/PN. Niaga.Jkt. Pst.jo. No. 187/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Ogan Lematang (Pemohon) melawan PT Odira Energy Karang Agung (Termohon) dengan hasil persidangan yaitu pemeriksaan alat bukti surat PT OEKA (Termohon) yang tertunda pada persidangan sebelumnya, persidangan ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 Februari 2022.

Rp.102/kWh, and the proposed component D which was previously Rp.18.43/kWh becomes Rp.18.43/kWh. The proposal in accordance with paragraph 1 of Clause II of the PPA will be reviewed and verified by BPKP, which will then be used as the basis for submitting an application for price adjustment to the Minister of Energy and Mineral Resources. And the amendments to the PPA related to the price adjustments for components B and D were carried out after the electricity purchase price was adjusted from the minister of ESDM.

Until reporting date, the submission for the tariff adjustment is still in process of completion.

PT OEKA (Subsidiary)

In 2019 PT OEKA entered into a peace agreement through a Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) with PT OEKA's creditors (in PKPU), in accordance with the letter of the peace agreement between PT OEKA and PT OEKA's creditors (in PKPU) dated December 17, 2019, and the court decision of homologation (HOMOLOGATION) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 18, 2019. Against the decision there are creditors who make an appeal.

Based on PT OEKA's Legal Correspondency Letter No. 133/EXT/OEKA/D00/I/2022 dated January 31, 2022, there are 2 legal cases being pursued by PT OEKA, among others:

1. Civil Case No. 564/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel in the South Jakarta District Court, between PT Dharma Empat Lima Abadi, PT Menara Gading Putih, and PT Ogan Lematang with PT OEKA, related to civil cases, appeal against the interim order of the court that stipulates PT OEKA shall continue to implement PKPU decision and peace agreements, the civil case until December 31, 2021 has been submitted in the form of Counter Memory of Appeal and there will be retrial on February 8, 2022, in the Trial Report on the application for the cancellation of the peace agreement (Homologation) delay of debt payment obligations (PKPU) No. 28/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst.jo. No. 187/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst between PT Ogan Lematang (Applicant) and PT Odira Energy Karang Agung (Respondent) with the results of the trial, namely the examination of PT OEKA's letter evidence (Respondent) pending at the previous trial, the trial was postponed and will be reopened on February 22, 2022.

(Lanjutan/Continued)

2. Perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst antara PT Ogan Lematang (Pemohon) dengan PT OEKA (Termohon), perkara permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut sampai tanggal 31 Desember 2021 sudah masuk sampai dengan tahapan pengajuan Replik dari pemohon.
 3. Selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara dan nomor putusan No. 73/PDT/2022/PT DKI dan telah menyatakan sah dan mengikat secara hukum bahwa, tetap mengikuti putusan pengadilan negeri No. 564/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 4. Perkara Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian ("Homologasi") Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") No. 28/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst. jo. No. 187/Pdt.Sus /PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst antara PT Ogan Lematang dengan PT Odira Energy Karang Agung dianggap batal demi hukum dikarenakan PT Odira Energy Karang Agung telah melakukan Sidang Permohonan Konsinyasi dengan No. 1/Pdt.P-Kons/2022/PN.Pbm Jo. No. 1/2022. Con/PN.Jkt.Pst yang bertempat di Pengadilan Negeri Prabumulih yang kurang lebihnya menyatakan sah dan menerima penitipan uang konsinyasi sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang dari PT Odira Energy Karang Agung kepada PT Ogan Lematang.
2. Case of request for cancellation of peace agreement (Homologation) Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst between PT Ogan Lematang (Applicant) and PT OEKA (Respondent), the case of the application for the cancellation of the peace agreement until December 31, 2021 has entered up to the stage of rcounter plea submission from the applicant.
 3. Furthermore, the Plaintiff filed an appeal to the High Court with the case number and decision number No. 73/PDT/2022/PT DKI and has stated that it is valid and legally binding that, still following the district court decision No. 564/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel at the South Jakarta District Court.
 4. Case for Request for Cancellation of Peace Agreement ("Homologation") Postponement of Obligations for Payment of Debt ("PKPU") No. 28/Pdt.Sus Cancellation of Peace/2021/PN.Commerce.Jkt.Pst.jo. No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst between PT Ogan Lematang and PT Odira Energy Karang Agung is considered null and void because PT Odira Energy Karang Agung has held a Consignment Application Session with No. 1/Pdt.P-Kons/2022/PN.Pbm Jo. No. 1/2022.Con/PN.Jkt.Pst which is located at the Prabumulih District Court which more or less states that it is valid and accepts consignment money in the amount of Rp.180,000,000 (one hundred and eighty million rupiah) in payment of debt from PT Odira Energy Karang Agung to PT Ogan Lematang.

Berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Perdamaian antara PT OEKA dengan para kreditor PT OEKA (dalam PKPU) tanggal 17 Desember 2019, dan Surat Putusan Pengesahan Perdamaian (HOMOLOGASI) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2019. PT OEKA sepakat melakukan pembayaran kepada para kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kreditor dengan jumlah piutang sampai dengan Rp.100.000.000 akan dibayarkan paling lambat 6 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 3 bulan sejak homologasi.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 akan dibayarkan paling lambat 12 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 6 bulan sejak homologasi.

Based on article 2 of the Peace Agreement Letter between PT OEKA and PT OEKA's creditors (in PKPU) dated December 17, 2019, and court decision of homologation (HOMOLOGATION) No. 187/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 18, 2019. PT OEKA agreed to make payments to creditors with the following conditions:

- Creditors with total receivables up to Rp.100,000,000 will be paid no later than 6 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 3 months from the homologation.
- Creditors with total receivables of Rp.100,000,000 to Rp.500,000,000 will be paid no later than 12 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 6 months from the homologation.

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 24 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 12 bulan sejak homologasi.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 54 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 36 bulan sejak homologasi, dengan opsi memberikan potongan piutang sebesar 25%.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 54 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 36 bulan sejak homologasi, dengan opsi tidak memberikan potongan piutang sebesar 25%, PT Multikarya Asia Pasifik Raya dan PT Prima Sentra Usaha.
- Kreditor dengan jumlah piutang dari Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp.150.000.000.000 akan dibayarkan paling lambat 120 bulan sejak homologasi dengan ketentuan Perusahaan memiliki masa tenggang selama 84 bulan sejak homologasi, dengan opsi memberikan potongan piutang sebesar 25%.
- Creditors with total receivables of Rp.500,000,000 to Rp.1,000,000,000 will be paid no later than 24 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 12 months from the homologation.
- Creditors with total receivables of Rp.1,000,000,000 to Rp.5,000,000,000 will be paid no later than 54 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 36 months from the homologation, with the option of providing a 25% discount on receivables.
- Creditors with total receivables of Rp.1,000,000,000 to Rp.5,000,000,000 will be paid no later than 54 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 36 months from the homologation, with the option of not giving a 25% discount on receivables, PT Multikarya Asia Pacific Raya and PT Prima Sentra Usaha.
- Creditors with total receivables of Rp.5,000,000,000 to Rp.150,000,000,000 will be paid no later than 120 months from the homologation provided that the Company has a grace period of 84 months from the homologation, with the option of providing a 25% discount on receivables.

35. SEGMENT OPERASI

a. Segmen primer

Segmen primer Perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/produk adalah sebagai berikut:

35. OPERATION SEGMENT

a. Primary segment

The Company's primary segments are classified based on business type/product produced, as follows:

31 Desember/December 31, 2022

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Aset				Assets
Aset segmen	162.017.473.175	1.186.909.258.341	1.348.926.731.516	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan	-	-	580.671.146.492	Non-allocation asset
Jumlah Aset	162.017.473.175	1.186.909.258.341	1.929.597.878.008	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang segmen	227.980.251.490	275.494.117.936	503.474.369.426	Segment liabilities
Utang segmen tidak dapat dialokasikan	-	-	1.300.674.867.102	Non-allocation segment liabilities
Jumlah Liabilitas	227.980.251.490	275.494.117.936	1.804.149.236.528	Total Liabilities

PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

31 Desember/December 31, 2022

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Penjualan dan pendapatan usaha	-	147.605.695.014	147.605.695.014	Sales and revenues
Beban pokok penjualan dan beban langsung	(4.339.795.163)	(129.664.358.367)	(134.004.153.530)	Cost of sale and direct cost
Hasil Segmen	(4.339.795.163)	17.941.336.647	13.601.541.484	Segment Revenue
Beban usaha	(1.265.127.406)	(5.394.230.938)	(6.659.358.344)	Operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(19.379.833.595)	Unallocated operating expenses
Rugi Usaha	(5.604.922.569)	12.547.105.709	(12.437.650.455)	Operating Loss
Pendapatan (beban) lain-lain	(44.899.055.153)	41.587.932.019	(3.311.123.134)	Other income (expense)
Pendapatan (beban) lain-lain yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(155.249.442.859)	Unallocated other income (expense)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(50.503.977.722)	54.135.037.728	(170.998.216.448)	Loss Before Income Tax

31 Desember/December 31, 2021

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Aset				Assets
Aset segmen	196.425.115.039	1.121.498.183.403	1.317.923.298.442	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan	-	-	597.673.895.582	Non-allocation asset
Jumlah Aset	196.425.115.039	1.121.498.183.403	1.915.597.194.024	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang segmen	223.936.182.116	246.014.395.550	469.950.577.666	Segment liabilities
Utang segmen tidak dapat dialokasikan	-	-	1.164.088.522.015	Non-allocation Segment liabilities
Jumlah Liabilitas	223.936.182.116	246.014.395.550	1.634.039.099.681	Total Liabilities

31 Desember/December 31, 2021

Keterangan	Penghasil Listrik Independen/ Independent Power Producer	Minyak dan Gas Bumi/ Oil and Gas	Konsolidasi/ Consolidated	Descriptions
Penjualan dan pendapatan usaha	-	138.699.027.599	138.699.027.599	Sales and revenues
Beban pokok penjualan dan beban langsung	(2.472.732.632)	(128.840.440.366)	(131.313.172.998)	Cost of sale and direct cost
Hasil Segmen	(2.472.732.632)	9.858.587.233	7.385.854.601	Segment Revenue
Beban usaha	(1.523.663.822)	(5.372.590.880)	(6.896.254.702)	Operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(14.137.079.243)	Unallocated operating expenses
Rugi Usaha	(3.996.396.454)	4.485.996.353	(13.647.479.344)	Operating Loss
Pendapatan (beban) lain-lain	(40.182.805.391)	93.734.915.589	53.552.110.198	Other income (expense)
Pendapatan (beban) lain-lain yang tidak dapat dialokasikan	-	-	(155.449.555.949)	Unallocated other income (expense)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(44.179.201.845)	98.220.911.942	(115.544.925.095)	Loss Before Income Tax

(Lanjutan/Continued)

b. Segmen sekunder

Segmen sekunder Perusahaan dikelompokkan berdasarkan daerah geografis dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>
Aset	
Sumatera	1.348.926.731.516
Jakarta	580.671.146.492
Jumlah	1.929.597.878.008
Liabilitas	
Sumatera	503.474.369.426
Jakarta	1.300.674.867.102
Jumlah	1.804.149.236.528
Pendapatan	
Sumatera	147.605.695.014
Jumlah	147.605.695.014

b. Secondary segment

The Company secondary segments are grouped on the basis of geographical locations:

	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Assets		Assets
Sumatera	1.317.923.298.442	Sumatera
Jakarta	597.673.895.582	Jakarta
Total	1.915.597.194.024	Total
Liabilities		Liabilities
Sumatera	469.950.577.666	Sumatera
Jakarta	1.164.088.522.015	Jakarta
Total	1.634.039.099.681	Total
Revenue		Revenue
Sumatera	138.699.027.599	Sumatera
Total	138.699.027.599	Total

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Instrumen keuangan utama Perusahaan terdiri dari setara kas, piutang usaha, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi. Instrumen keuangan tersebut berasal dari kegiatan usaha Perusahaan atau untuk tujuan pembiayaan bagi kegiatan operasional Perusahaan.

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang, risiko kredit dan risiko permodalan. Manajemen menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko keuangan sebagai berikut:

Risiko nilai tukar mata uang asing

Mata uang pelaporan Perusahaan adalah dalam Rupiah. Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing.

PT OEKA (Entitas anak) yang mempunyai kegiatan operasi, eksploitasi minyak dan gas bumi, mempunyai mata uang fungsional Dollar AS, sehingga tidak mempunyai dampak signifikan atas selisih kurs.

Selanjutnya Perusahaan tidak secara signifikan menggunakan mata uang asing, karena hampir semua transaksi aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company's principal financial instruments comprise of cash and cash equivalent, bank loan and loan from related party. These financial instruments mainly originated from the Company's operations or used to finance Company's operations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign currency risk, credit risk and capital risk. The management reviewed and approved policies for managing each of these financial risks, which are described in more detail as follows:

Foreign exchange risk

The Company's reporting currency is in Rupiah. Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because the changes in foreign exchange rates.

PT OEKA (Subsidiary), which has operations, exploitation of oil and gas, has a functional currency of the US Dollar, so that it does not have a significant impact on foreign exchange differences.

Furthermore, the Company does not significantly use foreign currencies, because almost all of its transactions assets and liabilities are denominated in Rupiah.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due.

(Lanjutan/Continued)

Manajemen berkeyakinan bahwa risiko likuiditas yang mungkin dihadapi masih dapat diatasi oleh Perusahaan.

Perusahaan dan entitas anak melakukan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo, selain itu Perusahaan juga mendapatkan komitmen dari pemegang saham berupa tambahan setoran modal.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan atas dari sewa operasi.

Piutang usaha Perusahaan saat ini hanya kepada PT Pertamina (Persero), risiko yang muncul jika terjadi gagal bayar karena PT Pertamina (Persero) tidak mampu untuk membayar atau terjadi konflik antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero).

Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit yang mungkin dihadapi Perusahaan relatif rendah, mengingat PT Pertamina (Persero) adalah salah satu badan usaha milik Negara yang berkredibilitas tinggi.

Management believes that the liquidity risk that may be occur can still be overcome by the Company.

The Company and subsidiary evaluate and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of funds to settle the due obligation in addition, the Company also received a commitment from shareholders in the form of additional capital deposits.

Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, when the Company's customers fail to fulfill their contractual obligations to the Company. Credit risk arises mainly from trade receivables that are given to customer as result of operating lease.

The Company's trade receivables are currently only to PT Pertamina (Persero), the risk that arises if there is a default because PT Pertamina (Persero) is unable to pay or there is a conflict between the Company and PT Pertamina (Persero).

Management believes that the credit risk that may be occur is low, considering that PT PLN (Persero) is one of the state-owned enterprises that highly credible.

37. KELANGSUNGAN HIDUP DAN RENCANA MANAJEMEN

Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami rugi bersih sebesar Rp.174.055.544.528 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.536.789.614.092, kejadian tersebut, mengidentifikasi terdapat ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan pada kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, manajemen sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perusahaan melalui anak Perusahaannya, yaitu PT Odira Energy Karang Agung, memiliki program kerja peningkatan produksi minyak bumi menjadi 350-400 BOPD yang saat ini telah mencapai 260 BOPD, serta melakukan *drilling* eksplorasi cadangan gas dengan potensi cadangan 70 BCF. Program kerja ini dapat meningkatkan laba bersih PT PP Energi secara konsolidasi dengan adanya peningkatan penjualan dari produksi minyak, atau perolehan *capital gain* jika program divestasi PT Odira Energy Karang Agung berhasil.

37. GOING CONCERN AND MANAGEMENT PLAN

The Company

The Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2022 suffered a net loss of Rp.174,055,544,528 with an accumulated deficit of Rp.536,789,614,092, the incident identified a material uncertainty that could cause significant doubts about the Company's ability to maintain business continuity.

To anticipate these situations, the Company's management has prepared a plan as follows:

- *The Company through its subsidiary, namely PT Odira Energy Karang Agung, has a work program to increase oil production to 350-400 BOPD which currently has reached 260 BOPD, as well as to conduct exploration drilling for gas reserves with potential reserves of 70 BCF. This work program can increase PT PP Energi's consolidated net profit by increasing sales from oil production, or obtaining capital gains if PT Odira Energy Karang Agung's divestment program is successful.*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Perusahaan melalui anak Perusahaannya, yaitu PT Inpola Meka Energi, memiliki portofolio energi terbarukan (renewable energy) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang telah beroperasi sejak Desember 2020. Pada tahun 2022 telah merealisasikan peningkatan produksi listrik yang cukup signifikan, dari sebelumnya sebesar 55,6 GWh pada tahun 2021 menjadi 78,7 GWh pada tahun 2022, dengan proyeksi yang akan terus membaik hingga 85 GWh pada tahun 2023. Perbaikan kinerja tersebut dapat meningkatkan laba bersih PT PP Energi secara konsolidasi dengan adanya peningkatan penyerapan laba, atau perolehan *capital gain* jika program divestasi PT Inpola Meka Energi berhasil.
 - Perusahaan memiliki beban yang sangat besar terhadap bunga *Shareholder Loan* dari PT PP (Persero) Tbk sehingga perusahaan memiliki rencana dalam pelunasan hutang kepada PT PP (Persero) Tbk dengan menggunakan dana dengan cara divestasi beberapa entitas anak perusahaan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas operasi di masing-masing anak perusahaan.
 - Melakukan efisiensi pada biaya usaha Perusahaan.
- *The Company through its subsidiary, namely PT Inpola Meka Energi, has a renewable energy portfolio in the form of a Mini Hydro Power Plant (PLTM) which has been in operation since December 2020. In 2022 it has realized a significant increase in electricity production, from before of 55.6 GWh in 2021 to 78.7 GWh in 2022, with projections that will continue to improve to 85 GWh in 2023. This performance improvement can increase PT PP Energi's net profit on a consolidated basis with an increase in profit absorption, or acquisition capital gain if PT Inpola Meka Energi's divestment program is successful.*
 - *The Company has a very large burden on shareholder loan interest from PT PP (Persero) Tbk so that the company has a plan to pay off debt to PT PP (Persero) Tbk by using funds by divesting several subsidiary entities.*
 - *Monitoring and evaluating operational activities in each subsidiary company.*
 - *Perform efficiency on the Company's business costs.*

PT SDP (Entitas Anak)

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami rugi bersih sebesar Rp.50.508.860.577 dengan akumulasi defisit sebesar Rp.217.603.117.285 yang mencapai 132,32% dari jumlah modal disetor yang hanya sebesar Rp.54.000.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini diakibatkan karena harga jual batubara yang dibayarkan oleh PT PLN (Persero) Tbk lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya dan Perusahaan memutuskan untuk memberhentikan sementara produksinya. Kejadian tersebut dan hal lainnya mengidentifikasi terdapat ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan pada kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, manajemen sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pada saat ini PT SDP masih menunggu perkembangan keputusan terkait amandemen tarif B dan D di BPKP Pusat yang sampai saat ini masih berjalan. Dan perkembangan amandemen nilai *Nett Plant Heat Rate (NPHR)* yang masih dalam proses negosiasi dengan PLN. Dimana pada tahun 2021 Perusahaan dan PLN sepakat menunjuk Pihak LAPI ITB untuk melakukan *reviu* penetapan NPHR IPP PLTU Lampung tengah, dan hasil rekomendasi dari

PT SDP (Subsidiary)

The Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2021 suffered a net loss of Rp.50,508,860,577 with an accumulated deficit of Rp.217,603,117,285 which reached 132.32% of the total paid-in capital that was only Rp.54,000,000,000 for the year ended December 31, 2022. This was due to the selling price of coal paid by PT PLN (Persero) Tbk which was lower than at the purchase price and the Company decided to suspend production. The incident and other things identified a material uncertainty that could cause significant doubts about the Company's ability to maintain business continuity.

To anticipate these situations, the Company's management has prepared a plan and perform actions as follows:

- *At this time PT SDP is still waiting for the development of a decision regarding the amendment to rates B and D at the Central BPKP which is still ongoing. And the development of amendments to the value of the *Nett Plant Heat Rate (NPHR)* which is still in the negotiation process with PLN. Where in 2021 the company and PLN agreed to appoint LAPI ITB to review the NPHR determination of the Central Lampung PLTU IPP, and the*

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

LAPI ITB terkait NPHR pada PLTU Lampung Tengah tersebut akan diterima oleh para pihak dengan ketentuan kesepakatan tersebut dan tunduk pada persetujuan perusahaan masing-masing pihak. Untuk kedua hal tersebut diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2023.

- Bersamaan dengan itu PT SDP sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm). Dalam hal ini PT SDP telah melakukan surat menyurat untuk mengajukan perubahan PLTU 2x7 MW menjadi PLTBm 2x5 MW atas perubahan tersebut membutuhkan tambahan Investasi. Untuk kebutuhan Investasi tersebut PPE menggandeng Investor Lokal yang berminat atas rencana pengembangan PLTBm. Sampai saat ini masih melakukan kajian bisnis untuk melengkapi kajian tersebut.
- Mengajukan permohonan kepada Bank Bukopin untuk memperpanjang keringanan ke-3 kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.150.000.000 per bulan yang berlaku dari bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2023, Rp.200.000.000 per bulan yang berlaku dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023, dan Rp.250.000.000 per bulan berlaku dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 dan sudah di setujui oleh Bank Bukopin.

recommendations from LAPI ITB regarding the NPHR at the Central Lampung PLTU will be accepted by the parties with the terms of the agreement and subject to the approval of the respective companies. - each side. Both of these are expected to be completed in mid-2023.

- At the same time, PT SDP is developing a Biomass Power Plant (PLTBm). In this case PT SDP has made correspondence to propose a change from the 2x7 MW PLTU to a 2x5 MW PLTBm, for the change requires additional investment. For these investment needs, PPE cooperates with local investors who are interested in the PLTBm development plan. Until now, they are still conducting business studies to complement the study.
- Submitted a request to Bank Bukopin to extend the 3rd waiver of principal and interest obligations of Rp.150,000,000 per month valid from May 2022 to January 2023, Rp.200,000,000 per month valid from February 2023 to July 2023, and Rp.250,000,000 per month valid from August 2023 to January 2024 and has been approved by Bank Bukopin.

38. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON KAS

- a. Pada tahun 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2022
Beban bunga pinjaman kepada PT PP (Persero) Tbk	118.019.239.288
Abandonment and Site Restoration Aset minyak dan gas bumi	7.467.424.791
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi	7.656.915.379
Aset minyak dan gas bumi sumur, perlengkapan dan fasilitas dalam pengerjaan	5.944.876.859
Accrual beban bunga bank bukopin	7.141.543.446
Pendapatan bunga PT IME	1.341.556.389
Potongan utang atas PT MDP	-
Setoran modal	-
Penerimaan utang bank	-
Akumulasi penyusutan aset hak guna	-
Jumlah	147.571.556.152

38. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

- a. In 2022 and 2021, the Company has investment and financing transactions that did not affect cash and cash equivalents and hence not included in the consolidated statements of cash flows with details as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	
	106.626.252.134	Loan interest expense to PT PP (Persero) Tbk
	-	Abandonment and Site Restoration Oil and gas properties
	-	Asset abandonment obligation and site restoration Oil and gas properties
	-	Well, equipment and attendant production facilities
	14.107.348.103	Accrued interest expense bank loan
	3.304.466.667	Interest Income PT IME
	88.167.985.402	Debt deduction for the PT MDP
	20.160.000.000	Paid-Up Capital
	36.720.530.624	Receipt of bank loans
	138.632.789	Accumulated depreciation of use rights assets
Total	269.225.215.719	Total

**PT PP ENERGI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PP ENERGI AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

b. Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

b. The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the year ended December 31, 2022.

	2022			31 Desember/ December 31, 2022	
	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flow	Lainnya/ Others		
Utang bank	92.813.240.483	(203.268.555)	1.898.033	92.611.869.961	Bank loan
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	92.813.240.483	(203.268.555)	1.898.033	92.611.869.961	Total liabilities from financial activities

39. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT PP Energi (induk Perusahaan saja) menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

39. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Financial information of PT PP Energi (parent Company only) presents the Company's investments in subsidiary under the cost method.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2023.

40. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statement and supplementary information were the responsibility of the management, and were approved by the Company's Director and authorized for issuance on February 28, 2023.

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
A S E T			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	190.966.725	191.551.910	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.32.073.280.395 dan Rp.13.489.541.770 pada 31 Desember 2022 dan 2021	130.695.953.587	72.365.209.627	<i>Other receivables - net of allowance for credit losses of Rp.32,073,280,395 and Rp.13,489,541,770 as at December 31, 2022 and 2022, respectively</i>
Pajak dibayar dimuka	1.815.195.887	2.334.168.490	<i>Prepaid taxes</i>
Jumlah Aset Lancar	<u>132.702.116.199</u>	<u>74.890.930.027</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit masing - masing sebesar Rp.258.539.735.531 dan Rp.213.929.380.732 pada 31 Desember 2022 dan 2021	561.528.924.575	684.646.808.724	<i>Other receivables - net of allowance for credit losses of Rp.258,539,735,531 and Rp.213,929,380,732 as at December 31, 2022 and 2021, respectively</i>
Investasi pada entitas asosiasi	201.547.478.039	432.380.148.321	<i>Investments in associates</i>
Investasi jangka panjang lainnya	246.428.935.000	11.284.935.000	<i>Other long-term investment</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.009.505.337.614</u>	<u>1.128.311.892.045</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	<u>1.142.207.453.813</u>	<u>1.203.202.822.072</u>	TOTAL ASSETS

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	-	154.000.000	Third party
Pihak ketiga	480.333.078	1.124.905.704	Related parties
Beban yang masih harus dibayar	4.588.413.056	3.626.575.234	Accrued expenses
Utang pajak	83.078.428	32.786.277	Taxes payables
Jumlah Liabilitas Lancar	<u>5.151.824.562</u>	<u>4.938.267.215</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain pihak berelasi	1.299.470.954.820	1.168.182.020.252	Others liabilities - related parties
Liabilitas program imbalan pasca kerja	4.105.408.507	1.525.400.453	Post-employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	<u>1.303.576.363.327</u>	<u>1.169.707.420.705</u>	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>1.308.728.187.889</u>	<u>1.174.645.687.920</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal			Capital stock - par value
Rp.1.000.000 per saham			Rp.1,000,000 per share
Modal dasar - 700.000 saham			Authorized capital - 700,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor -			Subscribed and paid-up capital -
masing-masing sebesar 541.233 saham			amounted of 541,233 shares
pada 31 Desember 2022 dan 2021	541.233.000.000	541.233.000.000	as at December 31, 2022 and 2021
Penghasilan komprehensif lain	(947.951.659)	(876.880.311)	Other comprehensive income
Defisit	(706.805.782.417)	(511.798.985.537)	Deficit
JUMLAH EKUITAS	<u>(166.520.734.076)</u>	<u>28.557.134.152</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>1.142.207.453.813</u>	<u>1.203.202.822.072</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA ATAU RUGI
DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	-	-	SALES AND REVENUES
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN			COST OF SALES AND
BEBAN LANGSUNG	-	-	DIRECT COST
Laba Kotor	-	-	Gross Profit
Beban administrasi dan umum	(18.622.115.838)	(14.137.079.243)	<i>Administration and general expenses</i>
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(176.384.681.042)	(182.460.651.622)	<i>Other income (charge) - net</i>
	<u>(195.006.796.880)</u>	<u>(196.597.730.865)</u>	
RUGI SEBELUM PAJAK	(195.006.796.880)	(196.597.730.865)	LOSS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	-	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>(195.006.796.880)</u>	<u>(196.597.730.865)</u>	LOSS FOR THE YEAR
Rugi Komprehensif Lain	(71.071.348)	(257.178.090)	<i>Other Comprehensive Loss</i>
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(195.077.868.228)</u>	<u>(196.854.908.955)</u>	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022 AND 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Subscribed and paid up capital</i>	Uang muka setoran modal/ <i>Advance for stock subscription</i>	Pendapatan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Defisit/ Deficit	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Saldo per 1 Januari 2021	521.073.000.000	20.160.000.000	(619.702.221)	(315.201.254.672)	225.412.043.107	<i>Balance as at January 1, 2021</i>
Setoran modal	20.160.000.000	(20.160.000.000)	-	-	-	<i>Paid-up capital</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(257.178.090)	(196.597.730.865)	(196.854.908.955)	<i>Comprehensive loss of the year</i>
Saldo per 31 Desember 2021	541.233.000.000	-	(876.880.311)	(511.798.985.537)	28.557.134.152	<i>Balance as at December 31, 2021</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(71.071.348)	(195.006.796.880)	(195.077.868.228)	<i>Comprehensive loss of the year</i>
Saldo per 31 Desember 2022	541.233.000.000	-	(947.951.659)	(706.805.782.417)	(166.520.734.076)	<i>Balance as at December 31, 2022</i>

PT PP ENERGI (ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PP ENERGI (PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan (penambahan) kas dari pelanggan	-	8.855.085.316	<i>Receipt from customers</i>
Pembayaran kas kepada:			<i>Cash disbursement to:</i>
Pemasok dan pihak ketiga lainnya	(6.980.925.539)	(5.670.298.859)	<i>Supplier and other third parties</i>
Direksi dan karyawan	(9.035.874.532)	(8.445.647.771)	<i>Board of directors and employees</i>
Kas dihasilkan dari operasi	(16.016.800.071)	(5.260.861.314)	Cash generated from operations
Pembayaran pajak	(1.446.219.813)	(1.141.091.130)	<i>Payment of taxation</i>
Kas Bersih (Digunakan untuk)			Net Cash (Used in)
Aktivitas Operasi	(17.463.019.884)	(6.401.952.444)	Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	1.823.698.303	1.686.802.015	<i>Interest received</i>
Penerimaan piutang	-	2.080.000.000	<i>Receipt of receivables</i>
Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Provided by
Aktivitas Investasi	1.823.698.303	3.766.802.015	Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang non-bank jangka panjang	32.331.208.245	51.738.109.578	<i>Received non bank loan - long-term</i>
Pembayaran pinjaman lain-lain	(16.695.000.000)	(49.621.008.983)	<i>Payment other loan</i>
Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Provided by
Aktivitas Pendanaan	15.636.208.245	2.117.100.595	Financing Activities
PENURUNAN BERSIH -			NET DECREASE -
KAS DAN SETARA KAS	(3.113.336)	(518.049.834)	CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS			EFFECT OF CHANGES
MATA UANG ASING	2.528.151	(1.007.067)	ON FOREIGN CURRENCY
KAS DAN SETARA KAS -			CASH AND CASH EQUIVALENTS -
AWAL TAHUN	191.551.910	710.608.811	BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS -			CASH AND CASH EQUIVALENTS -
AKHIR TAHUN	190.966.725	191.551.910	ENDING OF THE YEAR

ESTIMASI CADANGAN

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang *proved developed, undeveloped* dan *probable reserve quantities* serta sumber daya kontinjen hanya merupakan estimasi, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan PT OEKA (entitas anak). PT OEKA menekankan bahwa estimasi cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, estimasi ini diharapkan dapat saja berubah bila tersedia informasi baru dikemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali PT OEKA.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan dan sumber daya diestimasi oleh tenaga ahli PT OEKA ataupun berdasarkan estimasi oleh masing-masing operator blok. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan *proved* dan *probable* serta sumber daya kontinjen dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan dan sumber daya.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di bawah ini merupakan estimasi yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

RESERVES ESTIMATION

The following information on *proved developed, undeveloped* and *probable reserve quantities* as well as *contingent resources* are estimates only, and do not purpose to reflect realizable values or fair market values of the PT OEKA (subsidiary) reserves. PT OEKA emphasizes that reserve estimates are inherently imprecise. Accordingly, these estimates are expected to change as future information becomes available. There are numerous uncertainties inherent in estimating oil and natural gas reserves including many factors beyond the control of the PT OEKA.

The following information on the PT OEKA's reserves and resources quantities are estimated by the PT OEKA's expert based on estimates by the operators of the respective blocks. Generally accepted petroleum engineering principles and definitions applied by the industry to *proved* and *probable reserve* categories and subclassifications as well as *contingent resources* were utilized in preparing the reserves and resources disclosures.

Management believes that the reserve quantities shown below are reasonable estimates based on available geological and engineering data.

	Aset di Indonesia/ Indonesian Assets		Jumlah/ Total
	Minyak/ Oil	Gas	Minyak dan Gas/ Oil and Gas
	Mbbbls	mmscf	mboe
PT OEKA Cadangan Proven/ PT OEKA Proven Reserves			
Saldo Awal 31 Desember 2021/ <i>Beginning Balance, December 31, 2021</i>	4,756.70	6,524.37	5,922.85
Penemuan dan pengembangan/ <i>Discoveries and extensions</i>	-	-	-
Revisi/ <i>Revisions</i>	-	-	-
Akuisisi dan divestasi/ <i>Acquisitions and divestments</i>	-	-	-
Produksi/ <i>Production</i>	(93.77)	-	(93.77)
Saldo Akhir 31 Desember 2022/ <i>Ending Balance, December 31, 2022</i>	4,662.93	6,524.37	5,829.08
PT OEKA Probable and Prospect/ PT OEKA Probable and Prospect			
Saldo Awal 31 Desember 2021/ <i>Beginning Balance, December 31, 2021</i>	11,780.42	12,600	14,048.74
Revisi/ <i>Revisions</i>	-	-	-
Akuisisi dan divestasi/ <i>Acquisitions and divestments</i>	-	-	-
Produksi/ <i>Production</i>	(93.77)	-	(93.77)
Saldo akhir 31 Desember 2022/ <i>Ending Balance, December 31, 2022</i>	11,686.65	12,600	13,954.97